



**LPPD TAHUN
2024**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



**Disusun Oleh :
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 2 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (hasil);
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 2024 Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berlanjutan. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.1.1 Penjelasan Umum	1
A Dasar Hukum	1
B Data Geografis Wilayah	2
C Jumlah Penduduk	6
D Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	9
E Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	11
F Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	16
I.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	33
A Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	33
B Visi dan Misi Kepala Daerah	36
C Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	44
D Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen	45
	iii

Perencanaan Tahunan

I.3.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	48
	1 Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (LatarBelakang)	48
	2 Dasar Penerapan SPM	50
	3 Kebijakan Umum	51
	4 KebijakanPenerapan SPM.	53
	A. Bidang Urusan Pendidikan	53
	B. Bidang Urusan Kesehatan	54
	C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	56
	D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	57
	E. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	58
	F. Bidang Urusan Sosial	59
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		61
II.1	Kinerja Makro	61
II.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	68
II.2.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	68
	1 Urusan Pendidikan	68
	2 Urusan Kesehatan	68
	3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
	4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70
	5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	72
	6 Urusan Sosial	72
	7 Urusan Tenaga kerja	73

8	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73
9	Usuran Pangan	74
10	Usuran Pertanahan	74
11	Usuran Lingkungan Hidup	75
12	Usuran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	75
13	Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76
14	Usuran Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	77
15	Usuran Perhubungan	77
16	Usuran Komunikasi dan Informatika	78
17	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	78
18	Usuran Penanaman Modal	79
19	Usuran Kepemudaan dan Olahraga	79
20	Usuran Statistik	80
21	Usuran Persandian	80
22	Usuran Kebudayaan	80
23	Usuran Perpustakaan	81
24	Usuran Kearsipan	81
25	Usuran Kelautan dan Perikanan	82
26	Usuran Pariwisata	82
27	Usuran Pertanian	83
28	Usuran Kehutanan	83
29	Usuran Energi dan Sumber daya mineral	84
30	Usuran Perdagangan	84
31	Usuran Perindustrian	84
32	Usuran Transmigrasi	86
II.2.2	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	86

1	Urusan Pemerintahan(Perencanaan & Keuangan)	86
2	Urusan Pemerintahan(Pengadaan)	86
3	Urusan Pemerintahan(Kepegawaian)	87
4	Urusan Pemerintahan(Manajemen Keuangan)	88
5	Urusan Pemerintahan(Transparansi & Partisipasi Publik)	88
II.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	89
	A Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	89
	B Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Taret	89
	Perjanjian Kinerja	
	C Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target	93
	Dalam Pembangunan Jangka Menengah	
	D Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan	96
	Hasil (Kinerja Yang Telah Dicapai)	
	E Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian	115
	Target Kinerja	
	BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	128
	BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	129
4.1.	Urusan Pendidikan	129
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	129
4.1.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	129

4.1.3	Realisasi	130
4.1.4	Alokasi Anggaran	133
4.1.5	Dukungan Personil	134
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	135
4.2	Urusan Kesehatan	136
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	136
4.2.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	136
4.2.3	Realisasi	137
4.2.4	Alokasi Anggaran	141
4.2.5	Dukungan Personil	142
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	143
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	143
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	143
4.3.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	144
4.3.3	Realisasi	144
4.3.4	Alokasi Anggaran	146
4.3.5	Dukungan Personil	147
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	147
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	148
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	148
4.4.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	148
4.4.3	Realisasi	148
4.4.4	Alokasi Anggaran	149
4.4.5	Dukungan Personil	150
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	150
4.5	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	151

4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	151
4.5.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	151
4.5.3	Realisasi	152
4.5.4	Alokasi Anggaran	155
4.5.5	Dukungan Personil	156
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	156
4.6	Urusan Sosial	158
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	158
4.6.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	158
4.6.3	Realisasi	159
4.6.4	Alokasi Anggaran	161
4.6.5	Dukungan Personil	161
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	162
4.7	Program dan Kegiatan	162
BAB V PENUTUP		169
LAMPIRAN-LAMPIRAN		vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 2024 Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang perubahan rencana Strategis Paerangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

B. Data Geografis Wilayah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3°– 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5°– 112,9°BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km² ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya disebelah utara dan Kali Porong disebelah selatan.

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



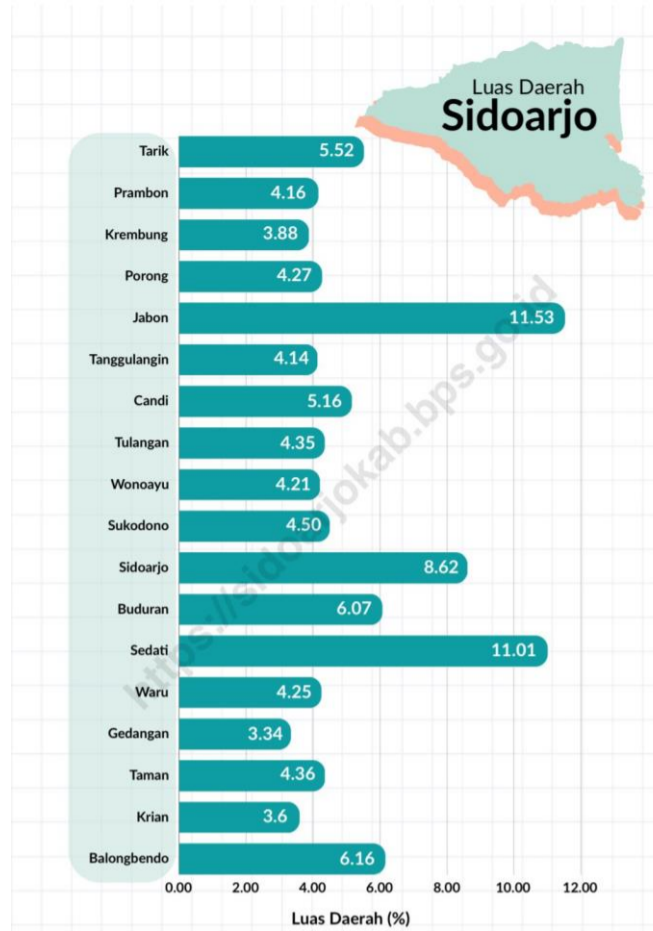
Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Capital of District	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Tarik	Mergosari	39,73
Prambon	Prambon	29,89
Krembung	Mojoruntut	27,90
Porong	Juwetkenongo	30,71
Jabon	Dukuhsari	82,92
Tanggulangin	Kalitengah	29,78
Candi	Gelam	42,86
Tulangan	Kenongo	31,31
Wonoayu	Wonoayu	30,29
Sukodono	Anggaswangi	32,85
Sidoarjo	Sidokumpul	62,03
Buduran	Banjarkemantren	43,65
Sedati	Pulungan	79,23
Waru	Janti	30,59
Gedangan	Keboansikep	24,01
Taman	Bebekan	31,36
Krian	Kraton	25,89
Balong Bendo	Wonokupang	44,34
Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo	719,34

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024



Sumber :Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu:

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat.

Sepanjang tahun 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 36,8oC, terjadi di bulan November dengan kelembaban rata rata 73,3%. Sementara suhu terendah terjadi di bulan September, sebesar 20,6oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 71,3 persen.

Sementara itu, BMKG juga mencatat selama Januari-Desember 2024 jumlah hari hujan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 156 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Desember dengan jumlah 27 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Desember, sebesar 584,6 mm dengan hari hujan sebanyak 27 hari. Curah hujan mulai turun secara signifikan di bulan Mei menjadi 0,5 mm dengan 4 hari hujan, namun kembali meningkat di bulan November, sebesar 209,6 mm dengan hari hujan sebanyak 17 hari.

Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2024

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	23,0	28,5	35,8	56	82	98
Februari/February	23,2	28,3	35,0	59	84	97
Maret/March	23,6	28,7	35,0	50	82	99
April/April	23,2	29,2	36,6	52	83	98
Mei/May	22,8	29,1	34,4	51	76	97
Juni/June	23,0	28,4	34,4	49	78	100
Juli/July	21,2	27,4	33,0	46	75	98
Agustus/August	20,4	27,5	33,4	39	72	93
September/September	23,2	29,0	35,0	32	69	92
Oktober/October	23,8	30,0	36,4	38	66	86
November/November	23,4	29,8	35,6	42	75	94
Desember/December	23,2	27,9	34,4	46	82	100

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2024

Bulan Month	Average Speed	Kecepatan Maksimum/ Maximum Speed	Rata-Rata/Average Atmospheric Pressure (mbar)
(1)	(8)	(9)	(11)
Januari/January	6,4	19	1010,2
Februari/February	6,0	21	1011,2
Maret/March	6,4	17	1010,4
April/April	5,3	11	1009,3
Mei/May	6,0	17	1010,0
Juni/June	5,9	15	1011,4
Juli/July	6,3	15	1011,7
Agustus/August	7,2	16	1012,2
September/September	7,1	18	1011,0
Oktober/October	7,3	17	1011,2
November/November	6,1	16	1009,5
Desember/December	6,8	19	1008,2

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2024

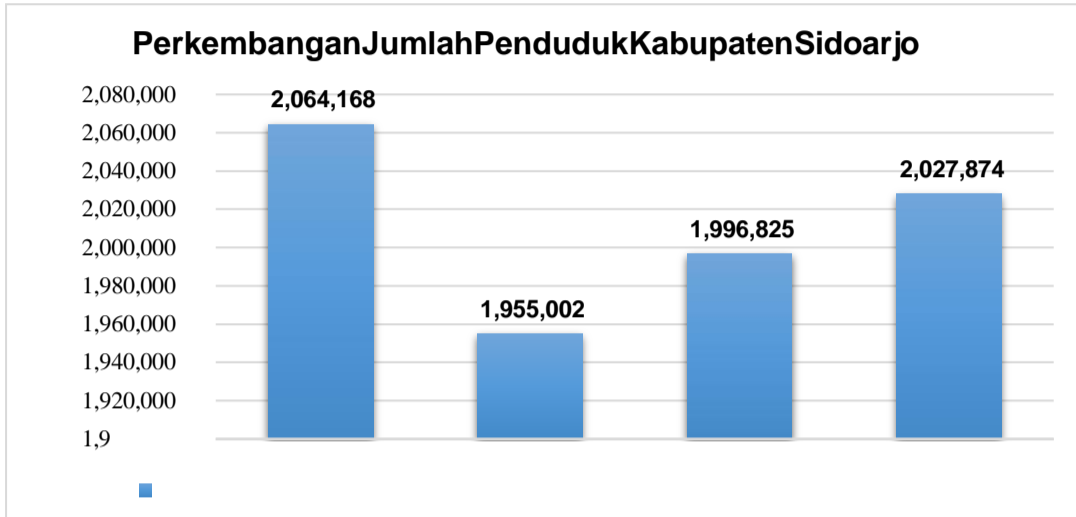
Bulan Month	Jumlah Curah Hujan (mm) Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari (persen) Duration of Sunshine (percent)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	396,8	24	78,0
Februari/February	445,3	23	85,0
Maret/March	125,6	19	22,0
April/April	363,0	22	80,0
Mei/May	0,5	4	1,0
Juni/June	98,4	11	36,0
Juli/July	24,5	2	20,0
Agustus/August	1,0	1	1,0
September/September	15,1	4	15,0
Oktober/October	8,1	2	8,0
November/November	209,6	17	50,0
Desember/December	584,6	27	96,0

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

C. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan potensi sumber daya manusia di suatu daerah. Terdapat beberapa sumber data kependudukan, antara lain sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei kependudukan.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada Desember 2024 tercatat sebesar 2.027.874. Berdasarkan jumlah tersebut Kecamatan Sidoarjo dan Taman dengan persentase terhadap total penduduk berturut-turut sebesar 9,87 persen dan 10,02 persen, merupakan dua kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sementara untuk kecamatan terpadat, dengan sekitar enam ribu tiga ratus orang lebih di setiap kilometer persegi, adalah Kecamatan Waru dan Taman.



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Jika didasarkan pada jenis kelamin, Kabupaten Sidoarjo memiliki sebanyak 1.015.862 jiwa penduduk laki-laki dan 1.012.012 jiwa penduduk perempuan pada Desember 2024, dengan rasio jenis kelamin Kabupaten Sidoarjo sebesar 100,38 yang berarti terdapat 100 sampai dengan 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

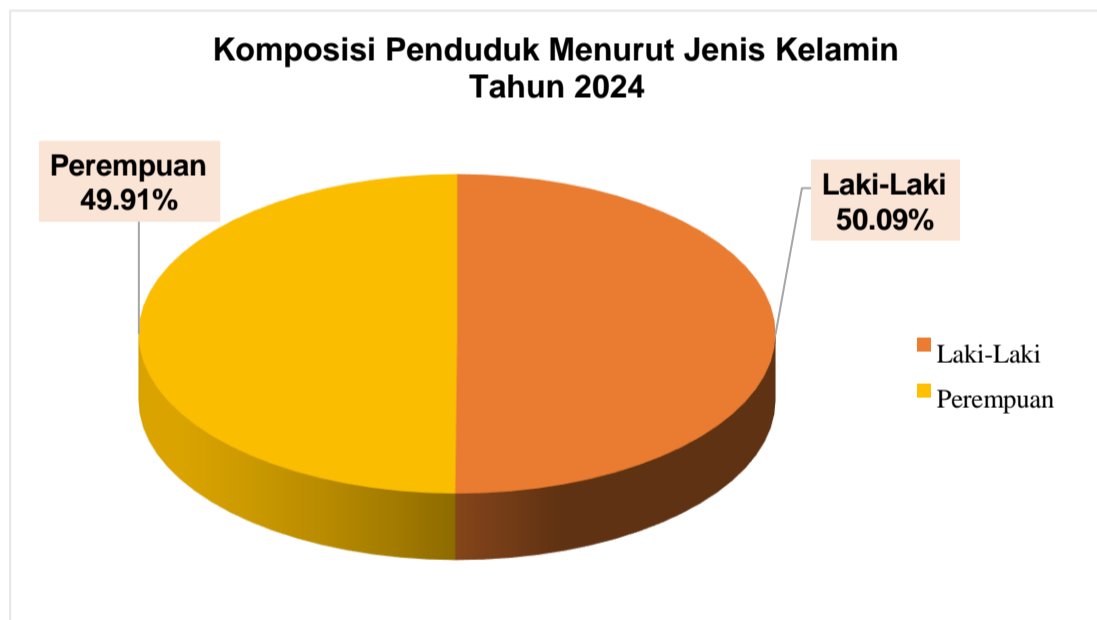
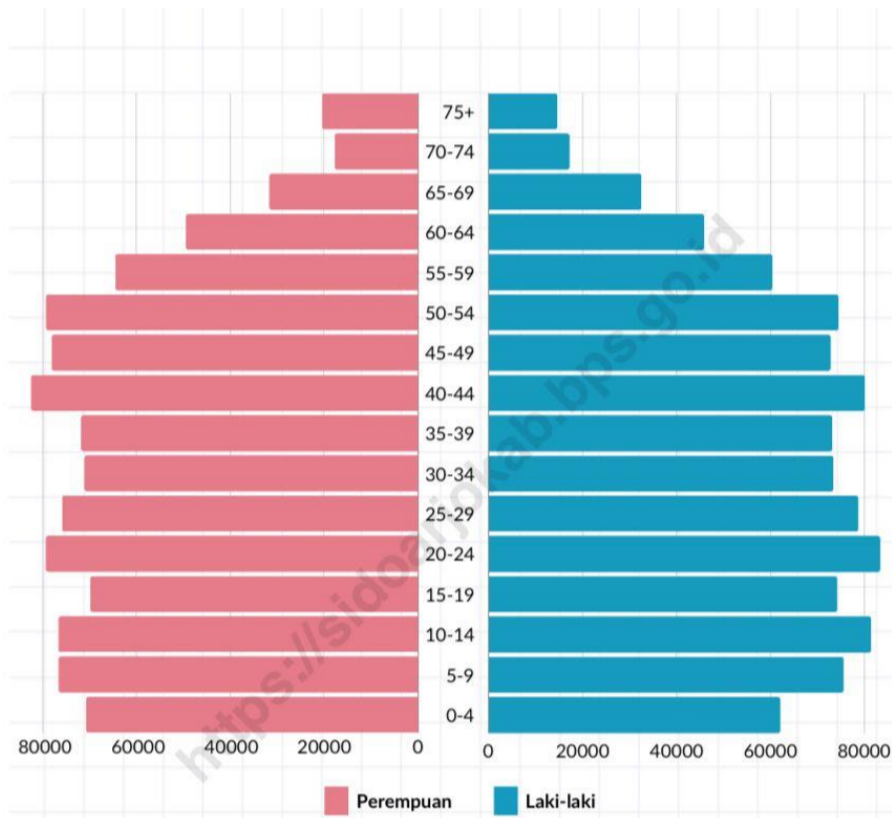
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

StrukturUsia	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	60.676	56.588	117.264
5-9	75.800	70.642	146.442
10-14	81.577	76.547	158.124
15-19	76.809	71.700	148.509
20-24	84.745	80.255	165.000
25-29	80.038	76.464	156.502
30-34	74.990	72.647	147.637
35-39	71.937	70.359	142.296
40-44	80.375	82.294	162.669
45-49	73.855	78.723	152.578
50-54	73.644	78.882	152.526
55-59	64.387	69.057	133.444
60-64	46.528	50.894	97.422

65-69	34.633	34.859	69.492
70-75	20.135	20.105	40.240
75+	15.733	21.996	37.729
JUMLAH	1.015.862	1.012.012	2.027.874

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan District	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tarik	34.287	33.661	67.948
Prambon	40.264	39.307	79.571
Krembung	34.613	34.488	69.101

Porong	35.479	34.976	70.455
Jabon	28.000	27.737	55.737
Tanggulangin	44.192	44.093	88.285
Candi	78.922	78.869	157.791
Tulangan	51.581	51.240	102.821
Wonoayu	43.082	42.256	85.338
Sukodono	63.169	62.409	125.578
Sidoarjo	99.232	100.938	200.170
Buduran	50.631	50.598	101.229
Sedati	48.969	48.709	97.678
Waru	96.869	98.892	195.761
Gedangan	60.118	59.948	120.066
Taman	101.722	101.412	203.134
Krian	67.041	65.770	132.811
Balongsendo	37.691	36.709	74.400
Kabupaten Sidoarjo	1.015.862	1.012.012	2.027.874

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 318 Desa dan 28 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urbanarea*). Pada Tahun 2023 dilakukan penggabungan untuk Desa dan Kelurahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang;
- 2) Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong.
- 3) Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
- 4) Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
- 5) Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon

Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang KecamatanTanggulangin.

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	12	3
5.	Krembung	19	-

6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	18	-
8.	Jabon	13	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongsendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	318	28

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 2020-2024

Kecamatan District	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tarik	20	20	20	20	20
Prambon	20	20	20	20	20
Kremlung	19	19	19	19	19
Porong	16	16	16	15	15
Jabon	14	14	14	13	13
Tanggulangin	18	18	18	18	18
Candi	24	24	24	24	24
Tulangan	22	22	22	22	22
Wonoayu	23	23	23	23	23
Sukodono	19	19	19	19	19
Sidoarjo	24	24	24	24	24
Buduran	15	15	15	15	15
Sedati	16	16	16	16	16
Waru	17	17	17	17	17
Gedangan	15	15	15	15	15
Taman	24	24	24	24	24
Krian	22	22	22	22	22
Balongsendo	20	20	20	20	20
Kabupaten Sidoarjo	348	348	348	346	346

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Grafik I.6

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

E. Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Salah satu instrument penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3	Inspektorat	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat daerah Kabupaten Sidoarjo
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
9	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

10	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
13	Dinas Pangan dan Pertanian	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
16	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo
22	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
27	Badan Kepegawaian Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Wewenang, Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo
30	Rumah Sakit Umum	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2024

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo		
48	Kecamatan Porong	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo
49	Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat	Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 13.934 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	17	78	39	134
2	Sekretariat DPRD	5	41	8	54
3	Inspektorat	4	15	54	73
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16	341	6.970	7.327
5	Dinas Kesehatan	24	163	1300	1.487
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	7	60	11	78
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	8	26	8	42
8	Satuan Polisi Pamong Praja	12	15	57	84
9	Dinas Sosial	6	10	5	21
10	Dinas Tenaga Kerja	6	8	16	30
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	12	6	24
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6	9	4	19
13	Dinas Pangan dan Pertanian	8	39	95	142
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7	205	12	224
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	23	20	49
16	Dinas Perhubungan	19	47	14	80
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	35	14	56
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6	21	2	29
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	14	7	26
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6	37	5	48
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	11	14	31
22	Dinas Perikanan	5	21	4	30
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	121	11	140
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	24	17	48
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	50	7	63
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	5	71	9	85
27	Badan Kepegawaian Daerah	8	34	24	66

28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	10	2	17
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	50	32	88
30	Rumah Sakit Umum Daerah	38	121	1.297	1.456
31	Kecamatan Sidoarjo	55	35	2	92
32	Kecamatan Candi	8	11	1	20
33	Kecamatan Buduran	8	11	2	21
34	Kecamatan Gedangan	8	10	1	19
35	Kecamatan Sedati	7	12	1	20
36	Kecamatan Waru	8	13	2	23
37	Kecamatan Taman	37	27	2	66
38	Kecamatan Sukodono	9	12	1	22
39	Kecamatan Wonoayu	7	13	1	21
40	Kecamatan Krian	8	12	0	20
41	Kecamatan Balongbendo	8	16	1	25
42	Kecamatan Tarik	5	16	1	22
43	Kecamatan Tulangan	8	11	1	20
44	Kecamatan Prambon	9	17	2	28
45	Kecamatan Krembung	6	12	1	19
46	Kecamatan Tanggulangin	9	12	1	22
47	Kecamatan Jabon	8	9	1	17
48	Kecamatan Porong	20	16	0	36
49	Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat	13	23	279	315
TOTAL		516	2.000	10.364	12.879

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :

- 1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- 3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan information and communication teknologi (ICT).
- 4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik.
- 5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD

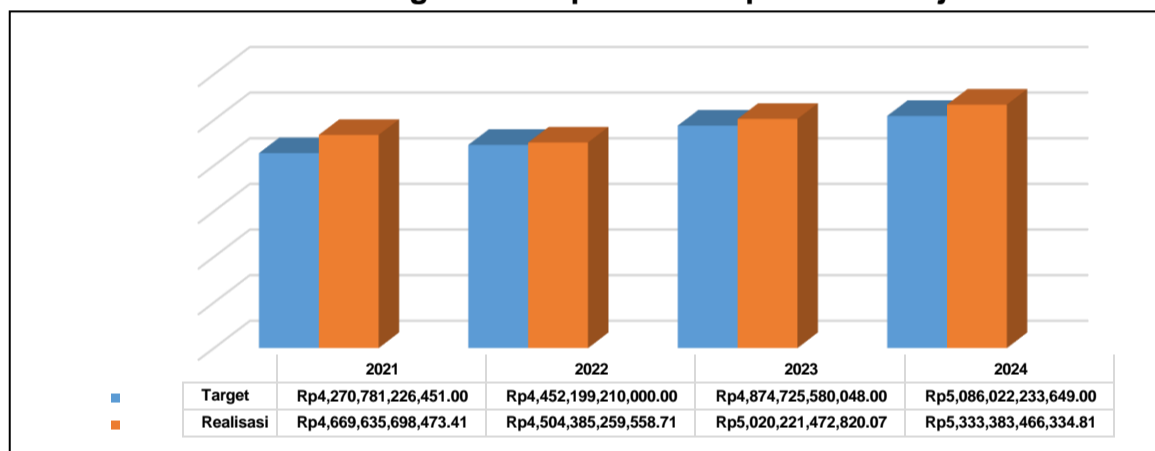
khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	TargetPendapatan	RealisasiPendapatan	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2020	Rp.4.058.099.090.414,00	Rp.4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp.4.270.781.226.451,00	Rp.4.669.635.698.473,41	109,34%
2022	Rp.4.452.199.210.000,00	Rp.4.504.385.259.558,71	101,17%
2023	Rp.4.874.725.580.048,00	Rp.5.020.221.472.820,07	102,98%
2024	Rp.5.086.022.233.649,00	Rp.5.333.383.466.334,81	104,86%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2021 s.d 2023 Audited, sedangkan untuk Tahun 2024 Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2021 s.d 2023 Audited, sedangkan untuk Tahun 2024 Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.5.333.383.466.334,81 atau 104,86% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.5.086.022.233.649,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN			
PENDAPATANASLIDAERAH	2.118.076.054.462,00	2.353.033.530.419,76	111,09
PENDAPATANTRANSFER	2.966.872.179.187,00	2.980.250.251.676	100,45

LAIN-LAINPENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.074.000.000,00	99.684.239,05	9,28
JUMLAHPENDAPATAN	5.086.022.233.649,00	5.333.383.466.334,81	104,86

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2021 s.d 2023 Audited, sedangkan untuk Tahun 2024 Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp.2.353.058.781.973.76 atau tercapai sebesar 111,09% dari seluruh target PAD sebesar Rp. 2.118.076.054.462,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	1.236.250.000.00000	1.407.663.067.473,40	113,87
1.1.2.	Retribusi Daerah	811.670.795.854,00	861.595.661.847,07	106,15
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	38.294.754.513,00	38.107.714.620,50	99,51
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	31.860.504.095,00	45.692.338.032,79	143,41
	JUMLAH	2.118.076.054.462,00	2.353.058.781.973.76	111,09

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan

urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk menadani pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut:

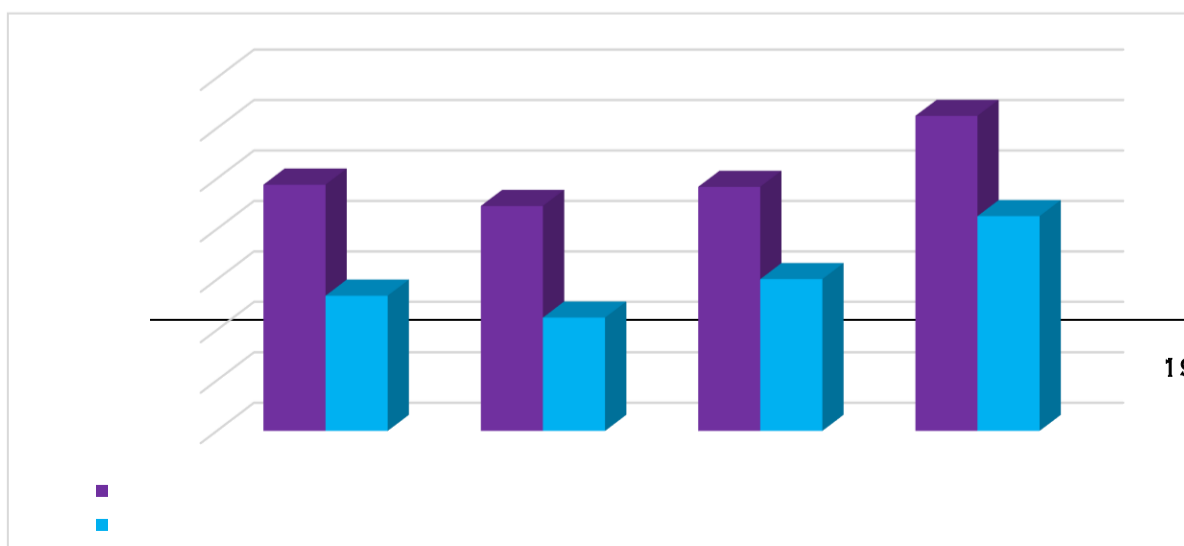
- 1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
- 2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
- 3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
- 4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2021	Rp.5.376.163.555.617,00	Rp.4.936.099.885.354,76	91,81%
2022	Rp.5.291.622.947.330,00	Rp.4.849.419.407.073,06	91,64%
2023	Rp.5.367.503.579.233,00	Rp.5.001.778.673.487,58	93,19%
2024	Rp.5.648.924.599.197,00	Rp.5.251.342.990.301,47	92,96%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo



	2021	2022	2023	2024
Anggaran	Rp5,376,163,555,617.00	Rp5,291,622,947,330.00	Rp5,367,503,579,233.00	Rp5,648,924,599,197.00
Realisasi	Rp4,936,099,885,354.76	Rp4,849,419,407,073.06	Rp5,001,778,673,487.58	Rp5,251,342,990,301.47

Sumber Data: Laporan Keuangan Kab.Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.5.648.924.599.197,00, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.5.246.635.536.155,47 atau tercapai sebesar 92,96%, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	4.213.238.158.297,00	3.935.999.993.833,47	93,42
BELANJA MODAL	785.236.983.251,00	668.077.999.318,00	85,08
BELANJA TIDAK TERDUGA	28.621.892.293,00	26.568.948.044,00	92,83
BELANJA TRANSFER	621.827.565.356,00	620.696.049.106,00	99,82
JUMLAH BELANJA DAERAH	5.648.924.599.197,00	5.251.342.990.301,47	92,96

Sumber Data: Laporan Keuangan Kab.Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.648.924.599.197,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.458.653.825.996,00	1.394.776.724.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	834.061.439.089,00	791.633.348.150,00
	Program Pengelolaan Pendidikan	623.624.786.907,00	602.189.928.350,00
	Program Pengendalian Perijinan	5.000.000,00	4.940.000,00
	Program Pengembangan Kebudayaan	743.910.000,00	731.870.000,00
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	218.690.000,00	216.637.500,00
2	DINAS KESEHATAN	556.323.737.975,00	534.495.511.592,50

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	322.501.218.611,00	317.544.161.484,50
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	215.739.708.992,00	199.826.240.938,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.552.003.352,00	4.725.187.183,00
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	556.386.420,00	443.245.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.974.420.600,00	11.956.676.987,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) R.T NOTOPURO SIDOARJO	897.476.388.372,00	792.505.203.219,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	872.147.874.572,00	768.205.148.340,92
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25.328.513.800,00	24.300.054.879,00
4	RUMAH SAKIT SIDOARJO BARAT	157.930.586.551,00	147.888.608.180,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	118.953.186.481,00	109.790.179.161,00
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38.977.400.070,00	38.098.429.019,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	377.299.190.637,00	313.577.284.420,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.442.402.534,00	18.823.079.432,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.479.432.201,00	10.044.271.406,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	31.656.486.506,00	28.646.471.712,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	314.720.869.396,00	256.063.461.870,00
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	97.696.859.276,00	86.600.461.519,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.396.800.735,00	14.337.382.300,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.789.239.143,00	14.742.850.714,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	26.086.655.390,00	24.405.838.761,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	7.563.801.823,00	5.947.073.560,00
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	752.375.000,00	500.872.205,00
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.946.200.934,00	1.823.036.600,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.750.000,00	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.513.373.526,00	10.746.722.333,00

	Program Pengembangan Perumahan	3.936.405.005,00	3.815.219.703,00
	Program Kawasan Permukiman	14.000.000,00	-
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.065.800.000,00	2.055.607.619,00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.596.847.720,00	8.216.357.724,00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	9.500.000,00	9.500.000,00
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	21.110.000,00	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.432.134.670,00	27.431.936.415,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.655.387.295,00	16.206.048.583,00
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.776.747.375,00	11.225.887.832,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.053.767.423,00	21.906.449.260,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.731.918.446,00	13.581.302.891,05
	Program Penanggulangan Bencana	1.759.076.570,00	981.570.109,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.562.772.407,00	7.343.576.260,00
9	DINAS SOSIAL	47.594.650.844,00	45.591.691.652,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.025.394.915,00	7.290.447.826,00
	Program Pemberdayaan Sosial	7.260.086.774,00	6.621.827.637,00
	Program Rehabilitasi Sosial	8.316.233.342,00	8.116.471.328,00
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.031.850.719,00	22.665.208.461,00
	Program Penanganan Bencana	943.692.504,00	890.536.400,00
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	17.392.590,00	7.200.000,00
10	DINAS TENAGA KERJA	15.851.228.906,00	14.748.002.335,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.459.953.937,00	8.076.809.855,00
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	107.482.000,00	105.106.000,00
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.856.953.461,00	3.276.873.980,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	858.007.369,00	814.805.300,00

	Program Hubungan Industrial	2.561.382.139,00	2.467.957.200,00
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7.450.000,00	6.450.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	36.157.887.454,00	35.220.358.661,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.362.957.493,00	6.988.815.232,00
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	196.970.749,00	196.132.500,00
	Program Perlindungan Perempuan	703.532.142,00	668.075.247,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	261.320.000,00	243.203.925,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	182.855.000,00	179.925.000,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	26.259.978.249,00	25.786.615.936,00
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	379.074.400,00	358.049.400,00
	Program Pengendalian Kependudukan	811.199.421,00	799.541.421,00
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	39.766.273.094,00	37.953.999.308,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.867.960.094,00	31.408.326.303,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.000.000,00	4.650.000,00
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.144.856.325,00	1.063.258.200,00
	Program Penangan Kerawanan Pangan	175.000.000,00	168.498.000,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	146.200.000,00	125.659.500,00
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.697.923.200,00	2.588.574.005,00
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	328.418.635,00	312.177.780,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.046.322.522,00	1.965.350.020,00
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	344.592.318,00	307.818.000,00
	Program Perizinan Usaha Pertanian	5.000.000,00	4.687.500,00
	Program Penyuluhan Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	141.269.793.371,00	117.510.899.604,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.937.221.793,00	74.854.739.177,00

	Program PengendalianPencemaran Dan/AtauKerusakanLingkunganHidup	2.917.373.299,00	2.526.349.176,00
	Program PengelolaanKeanekaragamanHayati (Kehati)	43.351.449.532,00	31.877.320.731,00
	Program PengendalianBahanBerbahaya Dan Beracun (B3) Dan LimbahBahanBerbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	131.359.200,00	92.428.036,00
	Program Pembinaan Dan PengawasanTerhadapIzinLingkungan Dan IzinPerlindungan Dan PengelolaanLingkunganHidup (PPLH)	310.671.000,00	240.461.704,00
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan PenyuluhanLingkunganHidupUntuk Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00
	Program PenangananPengaduanLingkunganHidup	295.102.239,00	213.743.568,00
	Program PengelolaanPersampahan	8.321.866.308,00	7.701.107.212,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	16.502.377.174,00	15.492.665.809,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.994.186.351,00	14.285.960.629,00
	Program PendaftaranPenduduk	204.817.569,00	101.510.000,00
	Program PencatatanSipil	321.809.030,00	234.436.000,00
	Program PengelolaanInformasiAdministrasiKependudukan	974.839.224,00	870.759.180,00
	Program PengelolaanProfilKependudukan	6.725.000,00	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83.717.455.408,00	82.003.025.493,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.353.734.178,00	6.495.704.151,00
	Program PenataanDesa	19.526.080,00	17.244.000,00
	Program PeningkatanKerjasamaDesa	260.256.053,00	218.910.203,00
	Program AdministrasiPemerintahanDesa	10.276.005.215,00	9.897.424.065,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat HukumAdat	65.807.933.882,00	65.373.743.074,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	123.466.592.176,00	112.036.317.338,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.619.534.929,00	16.753.549.156,00
	Program PenyelenggaraanLalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	99.936.161.337,00	89.447.941.567,00
	Program PengelolaanPerkeretaapian	5.882.685.910,00	5.806.690.615,00

	Program PengelolaanPelayaran	28.210.000,00	28.136.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.155.869.943,00	31.094.753.106,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.731.119.413,00	12.148.052.319,00
	Program Informasi Dan KomunikasiPublik	4.627.499.762,00	4.398.802.488,00
	Program PengelolaanAplikasiInformatika	13.531.879.038,00	13.340.591.569,00
	Program PenyelenggaraanStatistikSektoral	172.000.000,00	170.682.500,00
	Program PenyelenggaraanPersandianUntukPengamananInformasi	1.093.371.730,00	1.036.624.230,00
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	17.052.200.817,00	16.268.486.738,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.207.099.034,00	7.873.427.963,00
	Program PelayananIzin Usaha SimpanPinjam	26.380.160,00	26.205.000,00
	Program Pengawasan Dan PemeriksaanKoperasi	26.380.160,00	26.205.000,00
	Program PenilaianKesehatan KSP/USP Koperasi	10.966.850,00	10.859.000,00
	Program Pendidikan Dan LatihanPerkoperasian	189.039.100,00	181.660.770,00
	Program Pemberdayaan Dan PerlindunganKoperasi	849.320.325,00	804.543.126,00
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4.778.802.876,00	4.511.706.060,00
	Program Pengembangan UMKM	2.964.212.312,00	2.833.879.819,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.730.722.896,00	16.518.952.610,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.818.921.646,00	12.095.219.444,00
	Program PelayananPenanaman Modal	2.381.499.350,00	2.076.794.700,00
	Program PengembanganIklimPenanaman Modal	633.912.000,00	625.679.866,00
	Program Pengelolaan Data dan SistemInformasiPenanaman Modal	36.000.000,00	19.500.000,00
	Program PromosiPenanaman Modal	562.000.000,00	534.500.000,00
	Program PengendalianPelaksanaanPenanaman Modal	1.298.389.900,00	1.167.258.600,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	54.567.646.871,00	53.010.216.866,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.892.191.970,00	10.297.548.012,00

	Program PengembanganKapasitasDayaSaingKepemudaan	8.042.974.080,00	7.857.371.216,00
	Program PengembanganKapasitasKepramukaan	1.000.000.000,00	999.999.874,00
	Program PengembanganKapasitasDayaSaingKeolahragaan	32.808.518.771,00	32.114.654.153,00
	Program PeningkatanDaya Tarik DestinasiPariwisata	1.534.135.600,00	1.478.620.718,00
	Program PemasaranPariwisata	104.996.450,00	102.371.893,00
	Program PengembanganEkonomiKreatifMelaluiPemanfaatan dan PerlindunganHakKekayaanIntelektual	5.000.000,00	-
	Program PengembanganSumberDayaPariwisata Dan EkonomiKreatif	179.830.000,00	159.651.000,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.914.920.981,00	11.344.062.707,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.245.481.416,00	9.726.092.624,00
	Program PembinaanPerpustakaan	1.133.843.078,00	1.093.706.183,00
	Program PengelolaanArsip	520.655.646,00	510.566.150,00
	Program PelestarianKoleksiNasional dan NaskahKuno	4.990.000,00	4.961.500,00
	Program Perlindungan dan PenyelamatanArsip	4.986.608,00	4.033.750,00
	Program PerizinanPenggunaanArsip	4.964.233,00	4.702.500,00
22	DINAS PERIKANAN	16.631.805.280,00	15.621.460.465,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.378.664.240,00	7.166.977.916,00
	Program PengelolaanPerikananTangkap	87.596.000,00	83.831.600,00
	Program PengelolaanPerikananBudidaya	7.880.899.593,00	7.249.641.606,00
	Program PengawasanSumberDayaKelautan Dan Perikanan	119.554.800,00	96.360.852,00
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.165.090.647,00	1.024.648.491,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	63.087.554.544,00	59.259.527.089,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.151.606.904,00	26.351.744.380,00
	Program PeningkatanSaranaDistribusiPerdagangan	25.932.469.360,00	23.820.224.484,00
	Program StabilisasiHargaBarangKebutuhanPokok Dan BarangPenting	66.575.000,00	54.575.000,00
	Program PengembanganEkspor	2.572.252.600,00	2.484.668.900,00

	Program Standardisasi Dan PerlindunganKonsumen	298.803.541,00	278.017.352,00
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.907.622.139,00	6.170.554.473,00
	Program PengendalianIzin Usaha IndustriKabupaten/Kota	153.000.000,00	97.150.000,00
	Program PengelolaanSistemInformasiIndustriNasional	5.225.000,00	2.592.500,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	100.929.504.677,00	92.144.591.140,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.097.058.737,00	71.159.325.352,00
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.253.411.146,00	17.063.398.934,00
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.579.034.794,00	3.921.866.854,00
25	SEKRETARIAT DPRD	132.228.033.235,00	103.521.968.396,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.626.204.836,00	55.433.120.422,00
	Program DukunganPelaksanaanTugas Dan Fungsi DPRD	69.601.828.399,00	48.088.847.974,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.639.962.233,00	19.813.882.962,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.882.518.894,00	13.386.866.930,00
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.361.453.302,00	2.193.810.788,00
	Program Koordinasi Dan SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah	3.617.793.179,00	3.492.443.579,00
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	778.196.858,00	740.761.665,00
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	677.541.189.743,00	667.489.786.441,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.915.921.861,00	18.094.097.468,00
	Program PengelolaanKeuangan Daerah	654.876.632.724,00	646.056.991.341,00
	Program PengelolaanBarangMilik Daerah	3.748.635.158,00	3.338.697.632,00
28	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	51.221.967.533,00	39.905.786.146,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.675.815.903,00	33.438.717.402,00
	Program PengelolaanPendapatan Daerah	11.546.151.630,00	6.467.068.744,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19.074.854.425,00	17.562.464.375,00
	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.609.791.313,00	13.191.623.199,00

	Program Kepegawaian Daerah	3.019.670.081,00	2.134.711.179,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.445.393.031,00	2.236.129.997,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	156.001.992.881,00	154.285.625.396,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.839.346.091,00	5.554.316.532,00
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.495.802.800,00	1.445.922.949,00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.222.857.000,00	12.853.355.000,00
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	134.187.072.020,00	133.285.618.213,00
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20.000.000,00	20.000.000,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.236.914.970,00	1.126.412.702,00
31	INSPEKTORAT	20.477.608.955,00	19.621.388.267,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.422.686.451,00	18.813.164.677,00
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.054.922.504,00	808.223.590,00
32	KECAMATAN SIDOARJO	31.675.771.067,00	30.593.089.472,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.515.826.757,00	22.632.551.384,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	386.105.000,00	357.305.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.581.789.310,00	7.434.083.088,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.500.000,00	19.625.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	164.250.000,00	143.225.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.300.000,00	6.300.000,00
33	KECAMATAN CANDI	5.434.536.466,00	5.195.007.088,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.852.003.985,00	4.706.772.088,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	452.167.481,00	368.210.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93.200.000,00	84.480.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.700.000,00	31.080.000,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.465.000,00	4.465.000,00

34	KECAMATAN BUDURAN	6.113.734.928,00	5.857.744.555,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.030.307.928,00	4.903.136.055,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	355.518.000,00	269.262.500,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	375.920.000,00	355.221.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.309.000,00	58.150.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	293.680.000,00	271.975.000,00
35	KECAMATAN WONOAYU	5.250.397.061,00	5.093.213.121,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.726.163.641,00	4.632.104.921,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	368.419.420,00	307.713.200,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	56.539.000,00	55.639.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94.525.000,00	93.006.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.750.000,00	4.750.000,00
36	KECAMATAN KRIAN	12.078.041.308,00	11.727.267.592,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.422.173.111,00	9.172.495.576,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	360.550.837,00	286.973.822,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	83.992.227,00	82.386.975,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.967.588,00	49.209.938,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.543.820,00	15.143.500,00
	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	2.144.813.725,00	2.121.057.781,00
37	KECAMATAN PORONG	10.906.359.626,00	10.382.695.978,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.214.356.626,00	8.811.320.062,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	472.095.000,00	364.202.500,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.146.333.000,00	1.134.390.916,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	4.275.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.575.000,00	63.515.000,00

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.992.500,00
38	KECAMATAN KREMBUNG	5.436.844.670,00	5.086.972.837,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.954.529.670,00	4.654.773.837,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	324.910.000,00	277.985.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.925.000,00	83.040.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.730.000,00	66.424.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.750.000,00	4.750.000,00
39	KECAMATAN JABON	4.603.526.819,00	4.340.625.302,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.122.387.319,00	3.935.984.002,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.410.000,00	177.542.500,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.917.500,00	76.015.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	176.795.000,00	147.670.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.017.000,00	3.413.800,00
40	KECAMATAN BALONGBENDO	6.112.087.206,00	5.827.558.657,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.647.688.506,00	5.463.164.657,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	274.167.500,00	199.718.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.256.200,00	81.145.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	99.725.000,00	79.468.500,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.250.000,00	4.062.500,00
41	KECAMATAN TARIK	5.389.970.877,00	5.117.131.431,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.692.141.977,00	4.519.241.181,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	372.590.000,00	301.212.750,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	270.387.500,00	250.027.500,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.976.400,00	42.390.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.875.000,00	4.260.000,00

42	KECAMATAN TAMAN	20.850.819.062,00	20.357.457.606,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.834.512.817,00	15.502.398.471,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	413.327.500,00	335.980.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	75.475.000,00	74.637.500,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106.725.000,00	86.775.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.325.000,00	3.325.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.417.453.745,00	4.354.341.635,00
43	KECAMATAN WARU	5.916.164.208,00	5.719.512.247,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.347.210.447,00	5.188.128.566,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	422.880.713,00	390.971.935,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	54.438.145,00	52.963.805,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71.082.120,00	70.782.120,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.552.783,00	16.665.821,00
44	KECAMATAN GEDANGAN	5.723.773.682,00	5.501.000.726,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.133.210.432,00	4.969.490.876,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	166.325.000,00	125.065.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	119.626.250,00	116.940.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.904.500,00	39.792.500,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.707.500,00	249.712.350,00
45	KECAMATAN SEDATI	5.631.324.004,00	5.247.888.145,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.069.387.164,00	4.756.001.645,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	240.292.840,00	199.878.500,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93.700.000,00	90.955.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	124.994.000,00	99.993.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.950.000,00	101.060.000,00

46	KECAMATAN TANGGULANGIN	5.951.410.533,00	5.586.190.254,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.513.702.533,00	5.257.375.254,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	329.270.000,00	222.265.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	38.750.000,00	38.750.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.988.000,00	62.100.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.700.000,00	5.700.000,00
47	KECAMATAN TULANGAN	5.979.064.781,00	5.766.188.255,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.532.878.981,00	5.360.637.255,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	409.825.000,00	371.066.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.975.000,00	11.100.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.935.800,00	16.935.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.450.000,00	6.450.000,00
48	KECAMATAN PRAMBON	6.302.720.000,00	6.108.666.967,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.905.810.000,00	5.790.580.967,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	317.172.500,00	247.342.500,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43.400.000,00	35.607.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.137.500,00	29.727.500,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.200.000,00	5.409.000,00
49	KECAMATAN SUKODONO	6.119.468.558,00	5.925.234.412,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.636.073.558,00	5.485.912.712,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	297.997.500,00	271.921.700,00
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.150.000,00	59.090.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.647.500,00	100.790.000,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.600.000,00	7.520.000,00
	TOTAL ANGGARAN	5.648.924.599.197,00	5.246.635.536.155,47

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
 - a) Mewujudkan good governance melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
 - b) Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT).
 - c) Pengembangan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
 - d) Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - e) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.
 - f) Meningkatkan kualitas tatakelola dan kemandirian Desa.
2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Pengembangan Investasi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan.
 - a) Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro,
 - b) Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
 - c) Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
 - d) Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan lokal yang halal dan mampu berdaya saing serta berkelanjutan.

- e) Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
 - f) Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industry kreatif.
 - g) Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
 - h) Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuh kembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro.
 - i) Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistim ketahanan pangan daerah.
3. Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter. Pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variable yang dapat mengilustrasikan isu ini bagi kabupaten Sidoarjo antara lain;
- a. Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan yang memiliki daya saing regional dan memiliki kharakter budi pekerti yang baik.
 - b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
 - d. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
 - e. Pengelolaan potensi dan peningkatan peran pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
 - f. Cakupan layanan jaminan Pendidikan dan Kesehatan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
 - g. Prioritas implementasi pencapaian target SDGs pada indicator 1 sampai dengan nomor 9 dan dan nomor 11, yaitu menyangkut, kemiskinan, sanitasi lingkungan dan tatakota.
 - h. Meningkatkan kestaraan dan kehidupan yang inklusif bagi disabilitas dan seluruh elemen masyarakat.

4. Penataan Kota, Implementasi Sistem Transportasi Terpadu dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - a. Penyediaan sarana prasarana umum antara lain; RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, dan ruang publik lainnya.
 - b. Pengembangan transportasi massal bagi orang dan barang yang dapat mengatasi kemacetan.
 - c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
 - d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan 100% sanitasi,
 - e. Sistem pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.
 - f. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Pengembangan Wilayah Berbasis Keterkaitan antar Daerah yang Mendukung Percepatan Sektor Strategis.
 - a. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa,
 - b. Optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo guna menguatkan konektivitas pembangunan antar wilayah,
 - c. Integrasi pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung pemantapan Sektor Utama yaitu Perdagangan dan Industri,
 - d. Integrasi pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan Sektor Strategis, yaitu pariwisata, pertanian modern, perikanan dan jasa.
 - e. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
 - f. Percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sector pertanian dan perikanan.
6. Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dan Harmoni Sosial yang berbasis Kesetaraan, Keamanan dan Ketentraman.
 - a. Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
 - b. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll.

- c. Penanganan terhadap dampak bencana geologi lumpur Sidoarjo, antara lain penurunan tanah, banjir dan dampak lain yang ditimbulkan.
- d. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, perlindungan terhadap kaum disabilitas, antidiskrimasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
- e. Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- f. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut.

1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diembankan Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo di masa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel

Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<p><i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i></p>	<p><i>Sidoarjo Sejahtera</i></p>	<p>Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.</p>
	<p><i>Sidoarjo Maju</i></p>	<p>Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumber daya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala</p>

		upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<p>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</p>	<p>Sidoarjo Sejahtera</p>	<p>Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasadan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.</p>
	<p>Sidoarjo Maju</p>	<p>Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</p>
	<p>Sidoarjo Berkarakter</p>	<p>Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.</p> <p>Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</p>
	<p>Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.</p>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas,

inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: *Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.*

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: *Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.*

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagikelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo

Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.*

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*humanresources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasarlainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: *Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.*

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilainilai kegamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertibtentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 :	Mewujudkan	Indeks	Terselenggara	Nilai SAKIP

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Reformasi Birokrasi	nya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Kabupaten
				Opini atas Audit BPK
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja LPPD
				Nilai Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
Tingkat Maturitas SPIP				
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro,koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
				Pesentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi,Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase

				koperasi berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrastuktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
				Indeks Resiko Bencana
Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dasar Lainnya				
Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Toleransi Indeks Pelestarian Budaya Indeks Rasa Aman

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju, Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Program Prioritas 1 : 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. Program Prioritas 2 : BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Program Prioritas 3 : Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Program Prioritas 5 : Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Program Prioritas 6 : Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Program Prioritas 7 : Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. Program Prioritas 8 : 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Program Prioritas 9 : Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

10. Program Prioritas 10 : Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Program Prioritas 11 : Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer
12. Program Prioritas 12 : Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. Program Prioritas 13 : 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Program Prioritas 14 : Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. Program Prioritas 15 : 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat
16. Program Prioritas 16 : Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif
17. Program Prioritas 17 : Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, selain berpedoman pada Arah Kebijakan di tahun berkenaan dalam RPJMD sebagaimana disajikan di atas, maka penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 dan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Setelah dilakukan penyesuaian antara Arah Kebijakan RPJMD tahun 2024 dengan Tema RKP Tahun 2024 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 adalah “Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi Inklusif, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengangguran serta Peningkatan SDM yang Berkarakter”. Hal ini merupakan hasil dari telaah tema RKP dan RKPD Provinsi, arah kebijakan Nasional, arah kebijakan RPJMD di tahun 2024, sasaran pokok jangka Panjang, dan kondisi permasalahan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yaitu penurunan angka TPT yang masih tinggi (8,8%), Penurunan tingkat kemiskinan yang masih relative tinggi (5,36%), dan peningkatan kualitas SDM berbasis karakter dan daya saing.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



Sumber Data: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Dengan tema yang sudah ditentukan di atas, maka Sidoarjo memiliki 7 (tujuh) prioritas pembangunan dalam rangka menjaga ketercapaian arah kebijakan pembangunan yang telah ditentukan. Untuk mendukung tercapainya program prioritas pada tahun 2024, maka telah disusun analisis Critical Succes Factor Program Prioritas. Analisis ini disusun dalam rangka menganalisis factor-faktor utama yang akan menjadi penentu tercapai atau tidaknya program prioritas pada tahun 2024.

Critical Success Factor Pendukung Tema RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



Sumber Data: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Pada analisis Critical Succes Factor, untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 maka arah kebijakannya dibagi menjadi 3 (tiga) klaster besar yaitu:

Arah Kebijakan 1:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Pada klaster kebijakan 1 memuat **program prioritas 5** (lima) yaitu Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Industri, Perdagangan, jasa dan mendorong

berkembangnya Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata yang berorientasi Pengentasan Kemiskinan serta Pengangguran.

Arah Kebijakan 2:

Penguatan Daya Saing SDM

Arah kebijakan 2 merupakan penguatan daya saing SDM, baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kualitas SDM masyarakat Sidoarjo diharapkan akan meningkatkan daya saing daerah baik dari sisi pelayanan public maupun kualitas individunya. Arah kebijakan 2 ini memuat **Program Prioritas 4** yaitu Revitalisasi Nilai Budaya Lokal sebagai Spirit Pendukung Pembangunan Daerah; **Program Prioritas 6** yaitu Penguatan daya saing SDM yang berkarakter; dan **Program Prioritas 7** yaitu Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan suasana yang setara, toleran, tertib dan nyaman.

Arah Kebijakan 3:

Pemenuhan Daya Saing Infrastruktur sebagai Pendukung Investasi dan Sektor Strategis Lainnya

Sedangkan arah kebijakan 3 meliputi **Program Prioritas 1** yaitu Penataan Kota, Sistem Terpadu Pengurai Kemacetan, dan Pemenuhan Infrastruktur Pendorong Konektivitas Antar Wilayah; **Program Prioritas 2** yaitu Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman, Penangan Sampah Terpadu, serta Sarpras Utilitas lainnya; dan **Program Prioritas 3** yaitu Pemenuhan Kebuthan Sosial Dasar, Ketahanan Pangan, dan Energi Berkelanjutan.

Indikator pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 yang diselaraskan dengan indikator kinerja nasional dan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

**Keselarasan Target Indikator Pembangunan Daerah antara Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Target Nasional	Target Jawa Timur	Target Kabupaten Sidoarjo
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7	4,71 – 6,34	6,78*
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,5 – 7,5	9,90 – 8,80	4,87*
Indeks Gini	0,374 – 0,377	0,29 – 0,36	0,345
Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	72,44 – 73,57	81,40
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	4,95 – 3,81	7,96*

* Perubahan target tahun 2024, karena kinerja tahun berjalan sudah melebihi tahun bersangkutan

Sumber Data: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Prioritas pembangunan tahun 2024 tetap diarahkan untuk memperhatikan sinergitas antara pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur hingga prioritas pembangunan nasional. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.3.1 Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (Latar Belakang)

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

1.3.2. DASAR PENERAPAN SPM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

1.3.3 Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka

menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan kunci dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arah ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah kabupaten dengan seluruh PD, dan pemerintahan desa.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan

maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).

- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

1.3.4 KEBIJAKAN PENERAPAN SPM

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	2024
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2024
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2024

B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2024

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	2024
2	Penyediaan	Jumlah Warga	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		yang layak huni		

E. Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentangperubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		perkada		
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2024

F. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	2024
2	Rehabilitasi sosial dasaranak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	2024
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	2024

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	81.88	82.67	0,965
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	5	4.53	-9.4
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	8.05	6.49	-19,379
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.16	5.54	-10,065
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	127.38	136.72	7,332
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0.359	0.327	-8,914

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran usia harapan hidup, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Sidoarjo lebih baik dari capaian Jawa Timur dan Nasional. IPM Sidoarjo menduduki peringkat ke-4 (empat) dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pencapaian IPM tertinggi di Jawa Timur diduduki oleh Surabaya kemudian disusul oleh Kota Malang dan Kota Madiun. Realisasi kinerja IPM Sidoarjo tahun 2024 82,67 poin, capaian kinerja 101,19% dengan kategori "Sangat Tinggi".

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

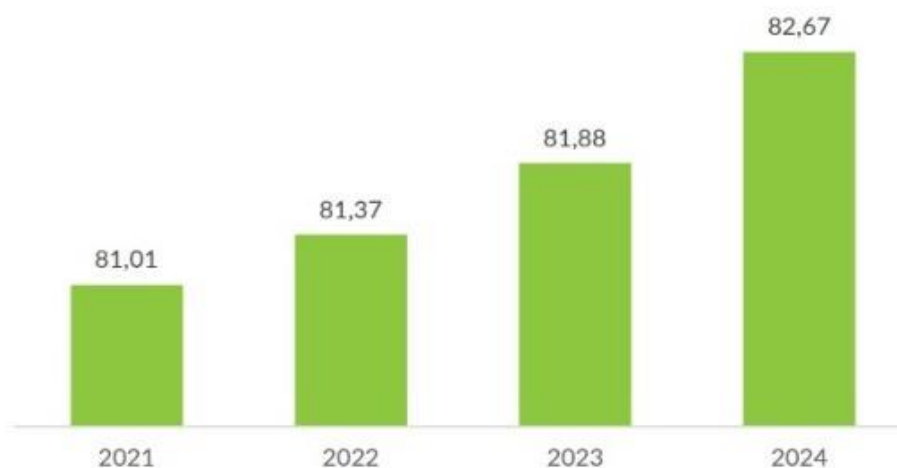
b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 adalah 82,67 dari target 81,17 atau mencapai target dengan capaian 101,85%. Sebagaimana pembagian level yang dibuat oleh BPS, IPM Kabupaten Sidoarjo berada pada level “**Sangat Tinggi**”, karena IPM Kabupaten Sidoarjo nilainya di atas 80. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 81,88 maka terdapat kenaikan 0,79 poin atau sekitar 0.96%. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangannya capaian IPM Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, berikut grafik perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024.



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

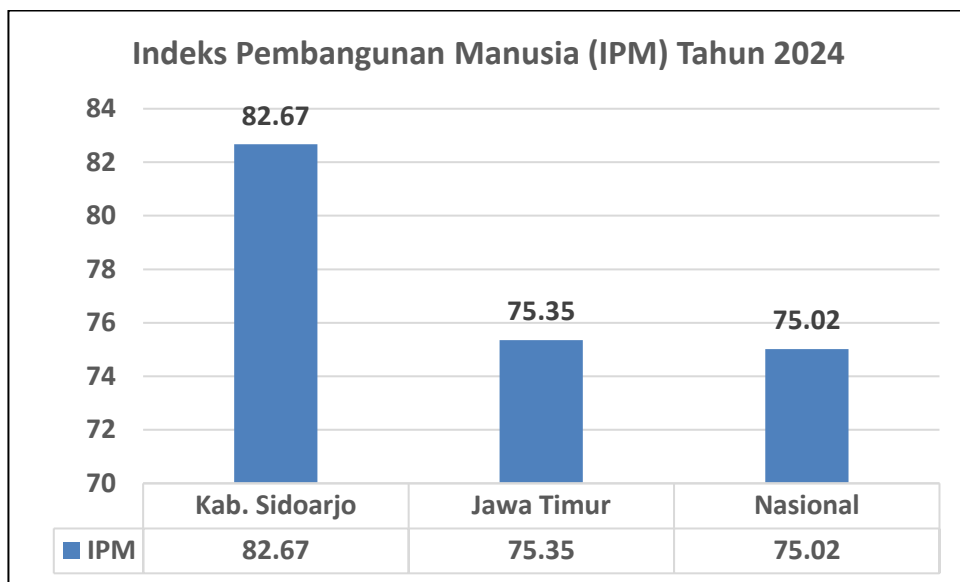
Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH SPLF2020)	Tahun	74,80	75,06	75,36	75,63
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,94	14,95	14,97	15,22
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,72	10,77	10,78	10,91
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.578	14.808	15.311	15.710
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		81,01	81,37	81,88	82,67

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 adalah 82,67. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJM sebesar 81,62, maka IPM Kabupaten Sidoarjo tahun ini sudah melampaui target akhir RPJMD. Demikian juga apabila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 telah melampaui IPM Jawa Timur 75,35 maupun IPM Nasional sebesar 75,02.



Sumber Data : BPS

2. Tingkat Kemiskinan

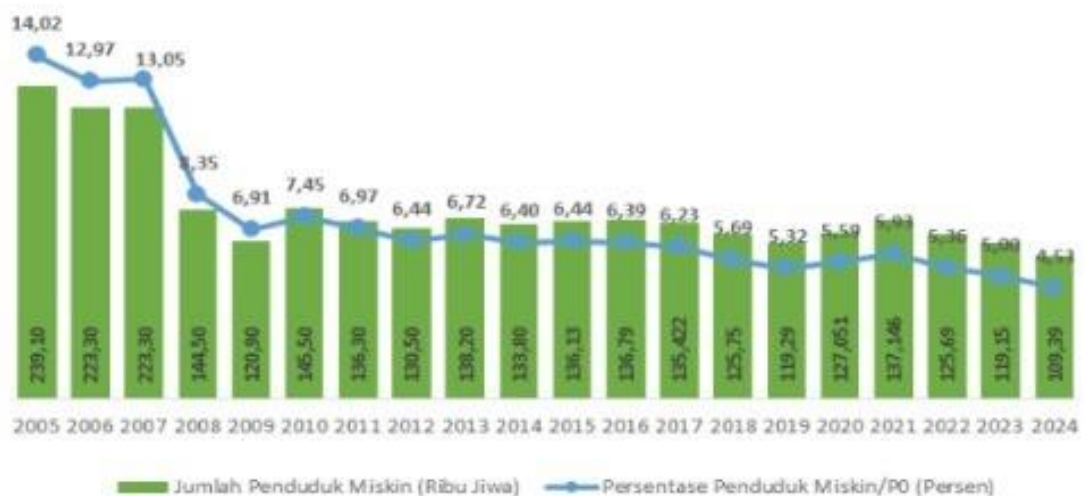
Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka Nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2024 Tingkat Kemiskinan mencapai 4,53 persen turun dari tahun 2023 yang masih berada pada angka 5%. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 5,30% maka capaian tahun 2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2024 mencapai 100,36 ribu jiwa.

Jumlah ini berkurang sebanyak 9,76 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 119,15 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 597.284 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 25.588,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,48 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp 571.696,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidoarjo Maret 2024 sebesar 0,64 mengalami penurunan sebesar -0.08 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,72.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Maret 2024 sebesar 0,18, mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,16. Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari 5,00 persen pada bulan Maret 2023 menjadi 4,53 persen pada bulan Maret 2024, ini berarti penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dan berkurang sebanyak 9,76 ribu jiwa dari 119,15 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 109,39 ribu jiwa pada Maret 2024 selain Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo termasuk lumayan baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada Bulan Agustus 2024 sebesar 6,49 persen, turun 1,56 poin dibandingkan dengan Bulan Agustus 2023 yang masih berada pada angka 8,05 persen.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 berkurang 3,92 ribu orang menjadi sebanyak 1.172,56 ribu orang dibandingkan Agustus 2023 sebanyak 1.176,48 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,37 persen, turun 1,25 persen poin dibandingkan TPAC Agustus 2023 sebesar 69,62 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.096,49 ribu orang atau bertambah 14,77 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Semua sektor pekerjaan utama mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri merupakan sektor yang paling banyak mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian dan jasa, yaitu bertambah sebanyak 10,26 ribu orang. Sedangkan sektor jasa bertambah sebanyak 4,50 ribu orang, dan sektor pertanian hanya bertambah 9 orang. Sebanyak 708,55 ribu orang (64,62 persen) bekerja pada kegiatan formal atau naik 2,28 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Lulusan Universitas memiliki TPT tertinggi di Sidoarjo, yaitu sebesar 7,68 persen, angka ini sama dengan kondisi pada Agustus 2023. Lulusan SMA mengalami penurunan TPT yang cukup tinggi, yaitu sebesar 5,00 persen poin dari 11,10 persen pada 2023 menjadi 6,09 persen.

Capaian TPT Kabupaten Sidoarjo terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
Sidoarjo	10,97	10,87	8,80	8,05	6,49

Sumber : BPS, BPS Jawa Timur dan BPS Kabupaten Sidoarjo 2025

Mencermati dari Tabel 7 di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat secara drastis di tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun

2022 TPT sudah mulai melandai. Pada tahun 2023 TPT mengalami penurunan pada angka 8,05% dan di Tahun 2024 mengalami penurunan kembali di angka 6,49% dan kategori kinerja adalah “Sangat Tinggi”. Secara agregat angka TPT Kabupaten Sidoarjo masih tinggi dibandingkan angka TPT Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi tingginya TPT adalah menciptakan 100.000 lapangan kerja baru.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan setelah pemulihan pasca pandemi covid-19, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 5,54. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 6,16 maka mengalami penurunan 0,62 poin.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	juta/million	1,95	1,99	2,03
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	0,68	1,12	1,10
Angka Kelahiran Total-AKT ¹ /Total Fertility Rate-TFR ¹	anak/child	1,84
Angka Kematian Bayi-AKB (per 1000 kelahiran hidup) ¹	bayi	11,26
Infant Mortality Rate-IMR (per 1000 life births) ¹	infant
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	75,06	75,36	75,63
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ²	%	72,87	69,62	68,37
Labour Force Participation Rate-LFPR ²				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ²	%	8,80	8,05	6,49
Unemployment Rate-UR ²				
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	ribu/thousand	125,69	119,15	109,39
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,36	5,00	4,53
Percentage of Poor People ³				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴	-	81,37	81,88	82,67
Human Development Index ⁴				
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵	triliun rupiah	245,23	273,70	296,89
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	trillion rupiahs			
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	7,53	6,16	5,54
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah	125,43	127,38	136,72
Per Capita of GRDP at Current Price	million rupiahs			

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Pemulihan ekonomi dan sosial diharapkan dapat menstimulasi perekonomian ke titik yang lebih baik. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 tumbuh sebesar 7,53%. Mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 6,16% dan di tahun 2024 juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di angka 5,54%. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan kebijakan – kebijakan strategis yang

dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya : pemberian KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri), Renovasi Warung Rakyat, Fasilitas UMKM Naik Kelas, dan lain sebagainya.

5. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

Kabupaten	Indeks Gini Per Kabupaten/ Kota di Jawa Timur		
	2022	2023	2024
Jawa Timur	0,371	0,387	0,372
Kab. Pacitan	0,338	0,352	0,327
Kab. Ponorogo	0,336	0,341	0,326
Kab. Trenggalek	0,331	0,336	0,350
Kab. Tulungagung	0,342	0,328	0,321
Kab. Blitar	0,335	0,360	0,353
Kab. Kediri	0,329	0,306	0,300
Kab. Malang	0,368	0,378	0,343
Kab. Lumajang	0,349	0,391	0,363
Kab. Jember	0,301	0,344	0,321
Kab. Banyuwangi	0,329	0,351	0,312
Kab. Bondowoso	0,365	0,350	0,333
Kab. Situbondo	0,298	0,326	0,385
Kab. Probolinggo	0,275	0,319	0,339
Kab. Pasuruan	0,325	0,367	0,331
Kab. Sidoarjo	0,373	0,359	0,327
Kab. Mojokerto	0,327	0,338	0,337
Kab. Jombang	0,310	0,339	0,302
Kab. Nganjuk	0,301	0,324	0,289
Kab. Madiun	0,354	0,342	0,309
Kab. Magetan	0,352	0,373	0,371
Kab. Ngawi	0,300	0,328	0,289
Kab. Bojonegoro	0,280	0,283	0,310

Sumber Data : BPS Jawa Timur

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 tercapai 0,327 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,359, maka capaian tahun 2024 lebih baik, yaitu menurun 0,032 angka.

Penurunan Indeks GINI mencerminkan bahwa pemerataan pembangunan dan perekonomian belum merata untuk seluruh masyarakat Sidoarjo. Perlu penguatan kewilayahan, yaitu melalui partisipasi dari seluruh RT untuk

mendukung percepatan pembangunan di masing – masing wilayahnya, salah satunya melalui Lomba RT.

II.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

II.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

1. URUSAN PENDIDIKAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,97 %	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,96 %	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,63 %	PD	

2. URUSAN KESEHATAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,16%	PD	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	96,88%	PD	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	PD	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	PD	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	PD	

		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	PD	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	PD	

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	84,05 %	PD	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab Sidoarjo mencapai 84,05%

		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0 %	PD	Sidoarjo tidak memiliki kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi sehingga rasionya adalah nol
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	97,07 %	PD	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 97,07 %
		Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	PD	Akses SPAM Jaringan Perpipaan sebanyak 200.969 SR dan Bukan Jaringan Perpipaan sebanyak 554.767 SR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	PD	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %	PD	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	95,87 %	PD	Panjang Jalan Mantap tahun 2024 mencapai 95,87%
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	PD	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	PD	

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0%	PD	Tidak ada kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, selama ini Kabupaten Sidoarjo hanya memberikan bantuan stimulant kepada korban bencana berupa sembako dan atau bahan bangunan
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	PD	Tidak ada kegiatan relokasi program pemerintah
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	80,99%	PD	kriteria - kriteria indikator permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.02/PRT/M/2016, meliputi (Direktorat Pengembangan Perumahan, 2016) : kondisi bangunan ; jalan lingkungan ; penyediaan air minum ; drainase lingkungan ; pengelolaan air limbah ; pengelolaan persampahan ; dan proteksi kebakaran
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,23%	PD	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	PD	

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	PD	Gangguan yang ditemukan telah diselesaikan dengan tuntas
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	PD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	PD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21,76%	PD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	PD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	41,67 %	PD	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	18,34 menit	PD	Total kejadian kebakaran pada tahun 2024 : 552 kejadian

6. URUSAN SOSIAL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	PD	

		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	PD	
--	--	---	-------	----	--

7. URUSAN TENAGA KERJA

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	5.82%		Data berdasarkan jumlah TK yang bersertifikat kompetensi dibagi Jumlah (penyerapan TKDN + TKLN + TK Dilaporkan WLKP)
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	14.678.727.33 7,231%		Data berdasarkan PDRB 2023 dikarenakan PDRB 2024 belum rilis dan Jumlah tenaga kerja tahun 2024
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80,61%		
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	68,08%		

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	58,15%		
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (IKK Negatif)	100%		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK Negatif)	8,50%		

9. URUSAN PANGAN

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0%	PD	Angka cadangan pangan yang digunakan adalah angka cadangan pangan masyarakat berupa gabah sebanyak 1 ton yang ada di kelompok Gapoktan Trinbakti Desa Segodobancang Kec. Tarik, yang dikonversikan menjadi beras sebanyak 0,641 ton beras.

10. URUSAN PERTANAHAN

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	PD	

		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0%	PD	Tidak ada Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum pada tahun 2024
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	PD	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	PD	Tidak ada kegiatan redistribusi tanah TOL dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	PD	Tidak ada penyediaan tanah untuk masyarakat
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	PD	

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	53,35	PD	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	89,73%	PD	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	10,34%	PD	

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99.67%	PD	Tahun 2023 Tercapai 99,89% Terdapat penurunan capaian, namun sudah mencapai target nasional . Target nasional sebesar 99,6% Penurunan capaian dikarenakan perubahan jumlah penduduk yang dinamis dan data konsolidasi bersih dari SIAK terpusat.
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	52,16%	PD	
		Kepemilikan akta kelahiran	97,69%	PD	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50%	PD	Capaian pada Tahun 2023 sebesar 77,78%. Terjadi penurunan capaian dikarenakan jumlah OPD sebagai target pemanfaatan Data berkurang (Penyebut) dikarenakan 18 kecamatan sudah tidak dianggap sebagai OPD yang bisa memanfaatkan Data

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	PD	Di Kabupaten Sidoarjo sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal hasil revie kemendagri: Apabila

					pemerintah kabupaten yang sudah tidak ada lagi desa tertinggal, maka menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dan diinput jumlah desa berkembang sebagai pembilang dan penyebut
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	86,67%	PD	

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,82	PD	Berdasarkan Nota Dinas Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Nomor: 287/PD.03/D1/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Penghitungan TFR dan ASFR 15-19 tahun Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Pemutakhiran PK-24
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,17%	PD	
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,10%	PD	

15. URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
-----	--------	-------------	---------	-------------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.86	PD	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,51	PD	Nilai VC ratio jalan di kabupaten sidoarjo tahun 2024 adalah 0,51 dengan nilai tingkat pelayanan C yang artinya arus lalu lintas stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan tetapi dalam kondisi ini masih tergolong aman untuk kondisi jalan kabupaten

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	PD	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	PD	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	PD	

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber	KET
-----	--------	-------------	---------	--------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	data (5)	(6)
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	73,58%	PD	sumber data ODS Kementrian Koperasi
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	93,69%	PD	Jumlah usaha mikro seluruhnya adalah jumlah usaha mikro yang menjadi binaan

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

No . (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Capaian (4)	Sumber data (5)	KET (6)
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	24,59 %	PD	Realisasi investasi daerah terdiri dari investasi PMA dan PMDN, yang mana nilai tersebut diperoleh dari rilis nilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Untuk capaian indikator ini tercapai sebesar 142,05% terhadap target tahun 2024 yaitu senilai Rp12.000.000.000.000. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan investasi daerah sebesar 24,59

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No . (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Capaian (4)	Sumber data (5)	KET (6)
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,77 %	PD	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10,51 %	PD	Data pada pembilang adalah data yang dimiliki oleh DISPORAPAR Kab. Sidoarjo sedangkan Data pada penyebut

					adalah data yang dimiliki oleh DISPENDUKAPIL Kab. Sidoarjo
		Peningkatan prestasi olahraga	157	PD	Perolehan Data dari KONI, KORMI DAN NPC

20. URUSAN STATISTIK

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	PD	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	PD	

21. URUSAN PERSANDIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	85,43%	PD	Indeks KAMI

22. URUSAN KEBUDAYAAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	PD	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang diusulkan untuk penetapannya sebanyak 16 objek, setelah diadakan kajian kemudian direkomendasikan oleh TACB untuk ditetapkan

					sebanyak 19 objek yang terdiri dari 6 objek Benda Cagar Budaya, 7 objek Struktur Cagar Budaya dan 6 objek Bangunan Cagar Budaya.
--	--	--	--	--	--

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	83,97	PD	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69,84	PD	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

24. URUSAN KEARSIPAN

No .	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100%	PD	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik	88,83%	PD	

		dan kesejahteraan rakyat			
--	--	--------------------------	--	--	--

25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	106,73%	PD	

26. URUSAN PARIWISATA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	121,08%	PD	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	-12,52%	PD	Penurunan jumlah wisatawan disebabkan karena adanya perbedaan jumlah dan durasi event yang diselenggarakan. Pada tahun lalu, berbagai acara besar diadakan dalam skala yang lebih luas dan berlangsung lebih lama seperti diantara 1 abad NU yang di hadiri oleh lebih dari 1 Juta orang dari seluruh Indonesia dan PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JATIM KE VIII yang diikuti 12.266 atlet dan 4.720 ofisial selama 1 pekan, yang berhasil menarik

					lebih banyak pengunjung. Event-event tersebut mencakup berbagai aktivitas yang mampu mengumpulkan kerumunan orang dalam periode yang lebih panjang, sehingga memberikan dampak positif terhadap jumlah wisatawan yang datang. Sementara itu, tahun ini jumlah event yang diselenggarakan lebih terbatas, serta durasinya lebih singkat, sehingga dampaknya terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung menjadi kecil
		Tingkat Hunian Akomodasi	48,43%	PD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.60%	PD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6.77%	PD	

27. URUSAN PERTANIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	675,937%	PD	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-67,58%	PD	

28. URUSAN KEHUTANAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

28	Kehutanan		100	PD	BUKAN KEWENANGAN
----	-----------	--	-----	----	------------------

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		0	PD	BUKAN KEWENANGAN

30. URUSAN PERDAGANGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 %	PD	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	90,55%	PD	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 %	PD	

31. URUSAN PERINDUSTRIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	27,56%	PD	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	118,97 %	PD	Capaian kinerja IKK dimaksud Nihil, dikarenakan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sidoarjo (RPIK) masih dalam tahap penyusunan. Sehingga target tahunan yang

					dijadikan sebagai tolak ukur capaian sasaran pembangunan industri belum ada. Dengan kata lain, indikator tersebut tidak dapat dihitung karena nilai pembandingan tidak ada.
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	PD	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	PD	Capaian kinerja IKK dimaksud Nihil, dikarenakan tidak ada pengajuan permohonan Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan menengah pada tahun 2024 sehingga tidak ada kinerja atau kegiatan pemantauan dan pengawasan atas izin yang dikeluarkan pada 2024. Dengan kata lain, obyek yang dipantau dan diawasi tidak ada
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	PD	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	PD	

32. URUSAN TRANSMIGRASI

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	TRANSMIGRASI		100	PD	BUKAN KEWENANGAN

II.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**1. URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,62%	PD	Data yang disajikan merupakan laporan unaudited
		Rasio PAD	44,16%	PD	Data yang disajikan merupakan laporan unaudited
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP level 3	PD	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3	PD	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,12%	PD	Data yang disajikan merupakan laporan unaudited
		Opini Laporan Keuangan	10 WTP	PD	

2. URUSAN PENGADAAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	PD	Tidak ada paket pengadaan barang/jasa dengan kontrak tahun jamak pada tahun 2024
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	98,35%	PD	

		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	24,59%	PD	
		Prosentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	-3,53%	PD	Perbedaan sumber data pada LPPD 2023 dan 2024 menyebabkan penurunan nilai LPPD pada indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, data yang digunakan bersumber dari database LPSE Kabupaten Sidoarjo sedangkan pada tahun 2024 menggunakan data dari Bigbox LKPP

3. URUSAN KEPEGAWAIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,58%	PD	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,05%	PD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	89,08%	PD	

4. URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	0,23 %	PD	Data yang disajikan merupakan laporan unaudited
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	18,65 %	PD	Data yang disajikan merupakan laporan unaudited
		Assets Management	4	PD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	12,85%	PD	Data yang disajikan merupakan laporan unaudited

5. URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	92,88%		Data yang disajikan merupakan laporan unaudited
		Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00%		

II.2.4. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 menetapkan Visi : **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**, didukung 5 Misi dan 6 Tujuan, 13 Sasaran Strategis, 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hasil penyelenggaraan pembangunan dijabarkan dalam 23 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 17 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang telah dipetakan dalam Tujuan dan indikator Tujuan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024. Dalam Laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Formulasi pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal.

Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 90,01%	Sangat Baik
2	80,01% s.d 90%	Baik
3	70,01% s.d 80%	Cukup
4	Kurang dari 70 %	Kurang

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Sidoarjo Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Sidoarjo merupakan kinerja tahun ke-4 pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja tujuan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah 117,78%, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah sebesar 103,20%, yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun data detail hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha					
	TUJUAN 1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha					
	Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi	Katagori	BB (78,00)	A (86,47)	110,86	MENPAN RB
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1. Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (75,64)	93,38	MENPAN RB
2. Opini Atas Laporan BPK		Opini	WTP	WTP	100	BPK	
3. Survey Eksternal Persepsi Korupsi		Angka	3,85	85,63 (3,42)**	90,96	KPK	
4. Status Kinerja LPPD		Katagori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi *)	100	BPKP	
5. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Indeks	4,00	3,97	99,25	MENPAN RB	

		6.	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif (62,00)	Sangat Inovatif (75,96)	122,52	MENPAN RB
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	BPK
2.	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A-	A (4,65) Prima	103,33	MENPAN RB
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan						
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan					
	Indikator Tujuan :	1.	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	6,78	5,54	81,71	BPS
		2.	Indeks Gini	Indeks	0,345	0,327	105,22	BPS
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,24	15,98	98,40	BPS
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	53,19	48,57	91,31	BPS
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,95	1,32	44,75	BPS
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,29	24,9	1930,23	BKPM
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	2,04	2,21	108,33	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	26,39	26,73	101,33	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		3.	Persentase Desa Mandiri	%	28,88	67,92	235,18	KEMENDES
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan					
	Indikator Tujuan	1.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	7,96	6,49	122,65	BPS
		2.	Persentase Penduduk Miskin	%	4,87	4,53	107,51	BPS
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	90,24	93,51	103,62	BPS
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	95,13	95,47	100,36	BPS
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan						

	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,780	0,850	108,97	BPS
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,82	53,35	89,18	BPS
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,766	0,822	107,31	BAPPEDA
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	88,64	95,60	107,85	BAPPEDA
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	84,82	117,28	BAPPEDA
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,55	49,71	96,43	DLHK
		2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,17	71,91	84,43	DLHK
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,13	25,28	93,18	DLHK
		4.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	86,98	96,70	86,83	BNPB
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya						
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,17	82,67	101,85	BPS
9.		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,89	15,22	95,78
	2.		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,56	10,91	94,38	BPS
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,98	75,63	99,54	BPS
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,37	94,72*)	99,32	BPS
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.						
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	87,30	87,33	100,03	Bappeda
12.		Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	Indeks	81,76	86,64	105,97
	2.		Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	66,76	92,55	138,63	Bappeda
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	Indeks	80,02	83,03	103,76	Bappeda

Keterangan :

*) : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2024

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 pencapaian terhadap 6 (enam) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, diketahui 5 (lima) indikator dalam katagori Sangat Berhasil, 2 (dua) indikator dalam katagori Berhasil dan terdapat 2 (dua) indikator yang belum dirilis hasilnya. Jika dirata-rata capaian kinerja tujuan tercapai 118,88% atau Sangat Berhasil. Sedangkan pencapaian terhadap 13 (tiga belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 12 (dua belas) indikator sasaran dinilai Sangat Berhasil, 12 (dua belas) indikator katagori Berhasil, 1 (satu) indikator dalam katagori Cukup dan 6 (enam) indikator yang belum dirilis hasilnya oleh Kementrian atau lembaga terkait.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDING DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Berikut adalah penjabaran terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo :

Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024			Keterangan
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B (67,66)	B (68,88)	BB (75,38)	BB (78,00)	A (86,47)	110,86	Tercapai
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	7,53	6,16	6,78	5,540	81,71	Tidak Tercapai
3	Indeks Gini	Poin	0,347	0,373	0,359	0,345	0,327	105,22	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,87	8,80	8,05	7,96	6,490	122,65	Tercapai
5	Persentase Penduduk Miskin	%	5,93	5,36	5,00	4,87	4,530	107,51	Tercapai
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,793	0,792	0,843	0,780	0,850	108,97	Tercapai
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,81	57,54	58,99	59,82	53,350	89,18	Tidak Tercapai
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,65	81,02	81,88	81,17	82,670	101,85	Tercapai
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	82,03	84,23	85,15	87,30	87,330	100,03	Tercapai

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, untuk 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 7 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan terhadap penyelenggaraan program Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, capaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan program Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024

N o.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (75,64)	93,38	Tidak Tercapai
2	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	Belum rilis
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,85	85,63 (3,42)**)	90,95	Sudah tidak dilakukan penilaian
4	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4,3)	Sangat Tinggi (3,78)*)	87,90	Belum rilis
5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,00	3,96	99,25	Tidak Tercapai
6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat inovatif (62,00)	Sangat inovatif (75,96)	122,52	Tercapai
7	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	Tercapai
8	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A- (Sangat Baik) 4,30	A (Prima) 4,65	108,14	Tercapai
9	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,24	15,98	98,40	Tidak Tercapai

10	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	53,19	48,57	91,31	Tidak Tercapai
11	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam artian luas.	%	2,95	1,32	44,75	Tidak Tercapai
12	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,29	24,9	1930,23	Tercapai
13	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	2,04	2,21	108,33	Tercapai
14	Persentase Koperasi Berkualitas	%	26,39	26,73	101,29	Tercapai
15	Persentase Desa Mandiri	%	28,88	67,92	235,18	Tercapai
16	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	91,95	93,51	101,70	Tercapai
17	Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan (GK)	%	95,13	95,47	100,36	Tercapai
18	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,766	0,822	107,33	Tercapai
19	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	88,64	95,60	107,85	Tercapai
20	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	84,82	117,28	Tercapai
21	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,55	49,71	96,43	Tidak Tercapai
22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,17	71,91	84,43	Tidak Tercapai
23	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,13	25,28	93,18	Tidak Tercapai
24	Indeks Resiko Bencana	Indeks	86,98	96,70	88,83	Tidak Tercapai
25	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,89	15,22	95,78	Tidak Tercapai
26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,56	10,91	94,38	Tidak Tercapai
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,98	75,63	99,54	Tidak Tercapai
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,37	94,72*)	99,32	Belum rilis

29	IndeksToleransi	Indeks	81,76	86,64	105,97	Tercapai
30	IndeksPelestarianBudaya	Indeks	66,76	92,55	138,63	Tercapai
31	Indeks Rasa Aman	Indeks	80,02	83,03	103,76	Tercapai

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Sedangkan untuk capaian 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 15 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 target. Karena belum dirilis oleh kementerian dan lembaga terkait, oleh karena itu angka yang ada pada table dengan symbol *) merupakan realisasi tahun 2023 dan symbol **) untuk tahun 2022.

Analisis Capaian Kinerja

Tujuan Pertama :					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.					
Indikator Tujuan/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi	Katagori	BB (78,00)	A (86,47)	110,86	Tercapai

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA YANG TELAH DICAPAI)

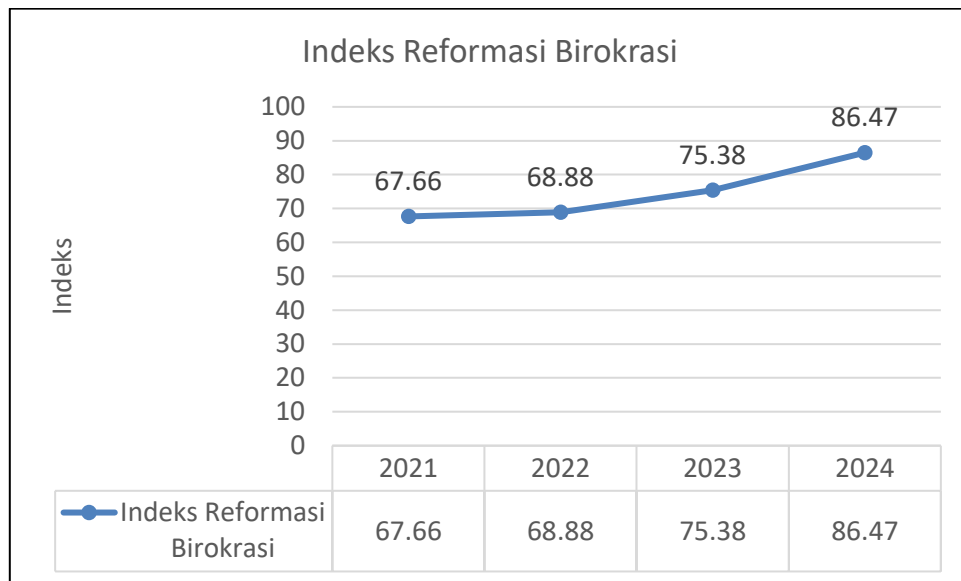
- Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami perbaikan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo berhasil memperoleh nilai indeks reformasi birokrasi sebesar **86,47** atau predikat **A**, melampaui target tahun ini yaitu **BB** dan sekaligus telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten

Sidoarjo 2021 – 2026 dengan predikat A. Capaian tersebut mengalami peningkatan **11,09 poin** dari tahun sebelumnya dengan skor **75,38**. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2021 – 2024, sebagai berikut :



Sebagaimana grafik di atas, perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2021 – 2024 terus mengalami peningkatan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan capaian rata-rata Nasional, sampai saat laporan ini disusun capaian RB tersebut masih belum diekspose oleh Kementerian PANRB.

Beberapa faktor utama **Pendukung Peningkatan Reformasi Birokrasi** yang berkontribusi terhadap peningkatan skor reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Implementasi sistem manajemen kinerja yang lebih transparan dan terukur.
- Peningkatan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) berbasis indikator kinerja utama (IKU).
- Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital guna memastikan keterbukaan informasi publik.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Digitalisasi layanan publik melalui sistem pelayanan berbasis elektronik (e-government).
- Penyederhanaan prosedur layanan administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah.

3. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Internal

- Penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Peningkatan peran Inspektorat dalam melakukan audit kinerja dan kepatuhan.
- Implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan whistle blowing system untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

4. Pengembangan SDM Aparatur yang Profesional

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
- Implementasi sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia.
- Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

5. Peningkatan Kinerja Organisasi dan Budaya Kerja

- Pembentukan budaya kerja yang adaptif dan inovatif.
- Penerapan sistem kerja berbasis kinerja yang lebih produktif.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.

Dampak dan Implikasi Peningkatan nilai reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Sidoarjo semakin dekat menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

Keberhasilan dalam peningkatan skor reformasi birokrasi tahun 2024 menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Memperkuat sinergi antar perangkat daerah** dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.
- **Melanjutkan inovasi dalam layanan publik** berbasis teknologi digital.
- **Meningkatkan keterlibatan masyarakat** dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.
- **Mengevaluasi secara berkala** pelaksanaan reformasi birokrasi guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat terus meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”, didukung melalui 2 Sasaran Strategis, sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital;
2. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

Sasaran 1 :Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (75,64)	93,38	Tidak Tercapai
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	Belum rilis
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,85	85,63 (3,42)*)	90,95	Sudah tidak dilakukan penilaian
4.	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)*)	87,90	Belum rilis
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,00	3,97	99,25	Tidak Tercapai
6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif (62,00)	Sangat Inovatif (75,96)	122,52	Tercapai
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	Tercapai

Keterangan :

*) :Realisasi merupakan realisasi tahun 2024

Sasaran I.

Indikator Kinerja ke-1 : Nilai SAKIP Kabupaten

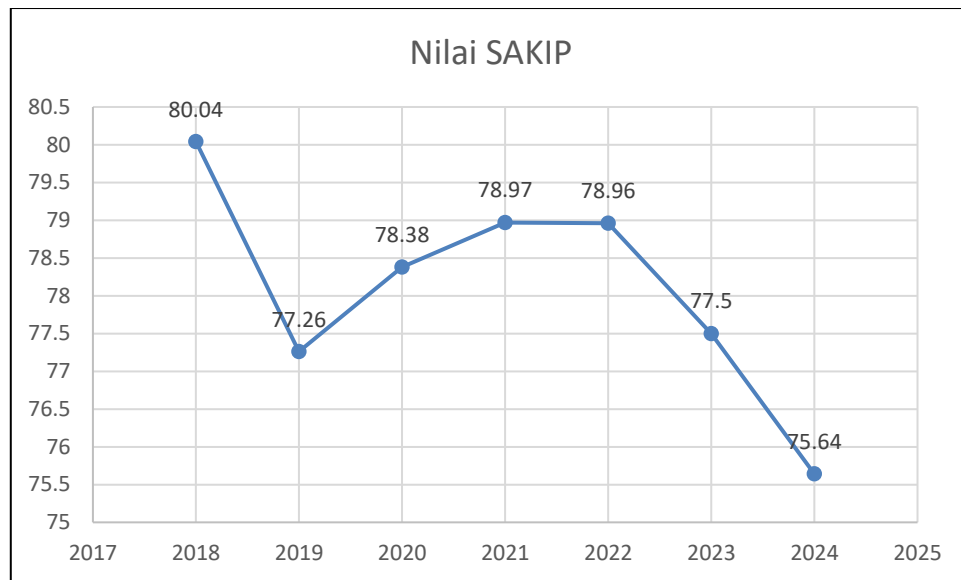
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (75,64)	93,38	AA (90,1)	83,95	TidakTercapai

Sumber Data : Kementerian PANRB

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo adalah 75,64 atau kategori BB. Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu A (Memuaskan) dan bahkan stagnan di katagori BB sejak tahun 2019 dan dua tahun terakhir telah mengalami penurunan. Berikut grafik perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2018 – 2024.



Sumber Data : LHE Menpan RB

Berdasarkan perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo serta capaian target akhir RPJMD tahun 2026 adalah AA, merupakan tantangan yang amat berat bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo harus bekerja ekstra keras untuk mencapainya, perlu komitmen yang kuat dari setiap elemen yang ada, mulai pimpinan dan semua sumber daya yang dimiliki harus serius bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkannya. Kalau dibandingkan dengan nilai rata-rata Kabupaten/Kota secara Nasional sebesar 64,23, maka Kabupaten Sidoarjo masih unggul 11,41 poin.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan implementasi SAKIP, antara lain :

1. Membangun aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP;
2. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan SAKIP pada Pejabat Perencanaan Perangkat Daerah;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat setiap tribulan dengan apalikasi e-Monev;
4. Melakukan evaluasi internal Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dengan mengacu Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021;

5. Memasukkan nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai salah satu bahan pertimbangan pemberian besaran TPP (Perbup Nomor 106 Tahun 2022);
6. Memberikan reward dan punishment bagi Perangkat Daerah atas nilai SAKIP yang dicapai.

Kendala atas ketidaktercapaian Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pohon Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dilakukan reviu sesuai Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
2. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo;
3. Banyaknya pejabat perencanaan yang dirotasi sehingga digantikan pejabat baru yang masih belum faham tentang SAKIP;

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kabupaten Sidoarjo kedepan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas SAKIP pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti rekomendasi LHE SAKIP tahun 2024 dengan mengkoordinasikan dan menyusun rencana aksi atas rekomendasi dimaksud;
2. Melakukan reviu penjenjangan kinerja/pohon kinerja yang disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP;
4. Terus melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah;
5. Selalu melakukan evaluasi berkala agar kualitas SAKIP Kabupaten Sidoarjo terus terjaga.

A.1.2 Indikator Kinerja II : Opini Atas Laporan BPK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100	Sangat Baik

Sumber Data : BPK

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam kurun waktu 11 tahun Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha

atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Adapun tren capaian Opini atas Audit BPK 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Opini atas Audit BPK
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Demikian juga bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target WTP, Kabupaten Sidoarjo tinggal mempertahankannya atas capaiannya selama ini karena Kabupaten Sidoarjo sudah mencapainya secara berturut-turut dari 11 tahun yang lalu.

Upaya yang dilakukan agar dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, dengan memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau standar yang berlaku. Kemudian menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan;
2. Melakukan pengelolaan aset dengan baik dan benar, dengan melakukan inventarisasi dan pencatatan aset tetap secara berkala dan dipastikan tercatat dengan benar, tidak fiktif serta sesuai dengan nilai wajar, dan menghindari aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau pencatatan yang tidak tertib;
3. Melakukan penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dengan memastikan adanya mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan atau kecurangan, menerapkan system pemisahan tugas untuk mengurangi resiko manipulasi keuangan, dan melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dan realisasi;
4. Melakukan penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan, yaitu anggaran dibuat realistis dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta rencana strategis, dan melakukan pelaporan realisasi anggaran secara berkala dan terbuka;
5. Dilakukan audit internal yang rutin dan efektif, yaitu dengan melakukan audit internal secara berkala untuk mendeteksi masalah sejak dini, serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil audit yang ditemukan;

6. Menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, yaitu menindaklanjuti jika ada temuan dari BPK segera dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, dan memastikan setiap rekomendasi dijalankan dan dilaporkan perkembangannya;
7. Meningkatkan kompetensi SDM dibidang keuangan, dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan, serta memastikan adanya tenaga akuntansi yang kompeten dan memahami regulasi yang ada.

A.1.3 Indikator Kinerja III : Survey Eksternal Persepsi Korupsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,81	85,63 (3,42)*)	89,76	3,95	86,58	Belum Release

Keterangan :) Realisasi tahun 2022*

Sampai dengan bulan Maret Tahun 2024, Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo masih belum release. Adapun kinerja yang mendukung pencapaian peningkatan hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi, antara lain :

Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Berdasarkan hasil *self assessment* atas Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah 3,000 ini berarti Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo sudah pada level 3 (*Integrated*).

Capaian Kapabilitas APIP level 3 (*Integrated*) mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo sudah mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Berikut Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Kapabilitas APIP
2020	Level 2 (<i>Infrastruktur</i>)
2021	Level 2 (<i>Infrastruktur</i>)
2022	Level 3 (<i>Integrated</i>)
2023	Level 3 (<i>Integrated</i>)
2024	Level 3 (<i>Integrated</i>)

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat Kapabilitas APIP optimal, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang bagi auditor internal berkaitan regulasi terbaru, metode audit, serta teknologi pengawasan serta meningkatkan pemahaman terkait risiko, tata kelola dan manajemen keuangan public;
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dengan menerapkan framework pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Audit), memastikan adanya pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi pengendalian internal, serta meningkatkan peran APIP sebagai mitra strategis bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan berbasis pengawasan;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan, dengan menggunakan Audit Berbasis Teknologi Informasi (ABTI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, serta dengan memanfaatkan big data analytics dalam mendeteksi anomaly penyimpangan keuangan, kemudian menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis elektronik untuk pengawasan yang lebih transparan;
4. Penguatan Independensi dan Objektivitas APIP, dengan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan, menghindari intervensi dari pihak yang diawasi agar hasil audit tetap objektif, serta memastikan adanya dukungan dari pimpinan dalam meningkatkan peran APIP;
5. Meningkatkan kolaborasi dengan instansi eksternal, bekerjasama dengan BPK, BPKP, KPK, dan Inspektorat Jendral dalam pertukaran informasi dan penguatan pengawasan, serta melakukan benchmarking dengan instansi lain untuk mengadopsi best practices dalam pengawasan internal;
6. Menindaklanjuti temuan audit secara efektif, dengan memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil audit, memberikan rekomendasi yang realistis dan implementatif kepada pimpinan terkait temuan

audit, serta melakukan reviu dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap system pengawasan yang diterapkan.

7. Memutakhirkan *risk register* yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

A.1.4 Indikator Kinerja IV : Status Kinerja LPPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
4.	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)*	87,90	Sangat Tinggi	87,90	Baik

Sumber Data : BPKP

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tahun	Kepmendagri	Nilai	Status Kinerja	Peringkat
2022 (Kinerja Tahun 2021)	Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	3,6100	Tinggi	Ke-5 Nasional
2023 (Kinerja Tahun 2022)	Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	3,7800	Tinggi	Ke-2 Nasional

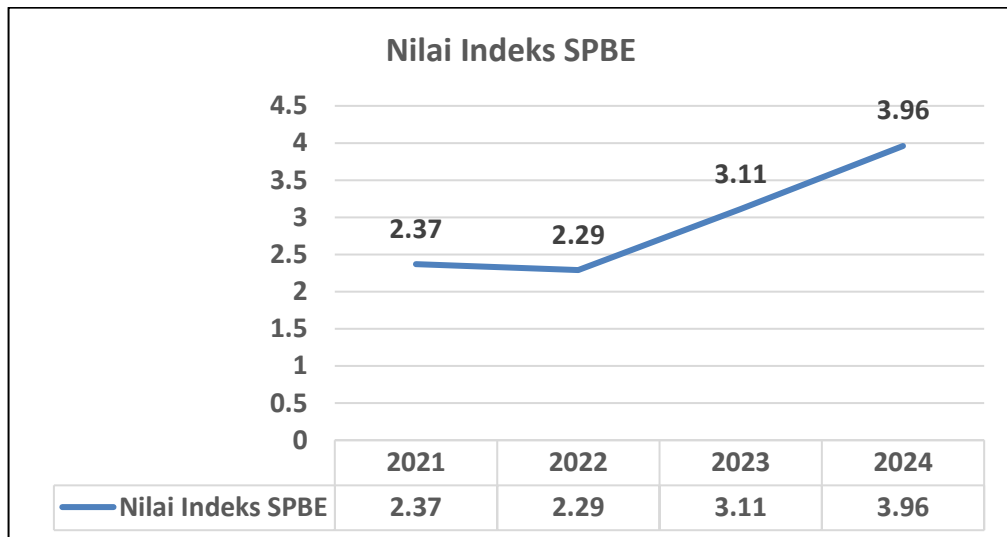
Untuk hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, sampai aporan ini disusun masih belum ada release dari Kementerian Dalam Negeri. Berkenaan dengan ditetapkannya Permendageri Nomor 18 Tahun 2020, maka system penilaian mengalami perubahan sehingga tahun 2022 dan 2023 status kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo karena ditargetkan Sangat Tinggi (ST) maka masih mengalami kesulitan, dan belum ada Kabupaten / Kota yang sudah mencapai kategori dimaksud. Meskipun demikian Kabupaten Sidoarjo menempati Peringkat ke-2 terbaik Nasional dalam pencapaian indikator LPPD.

A.1.5 Indikator Kinerja V : Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

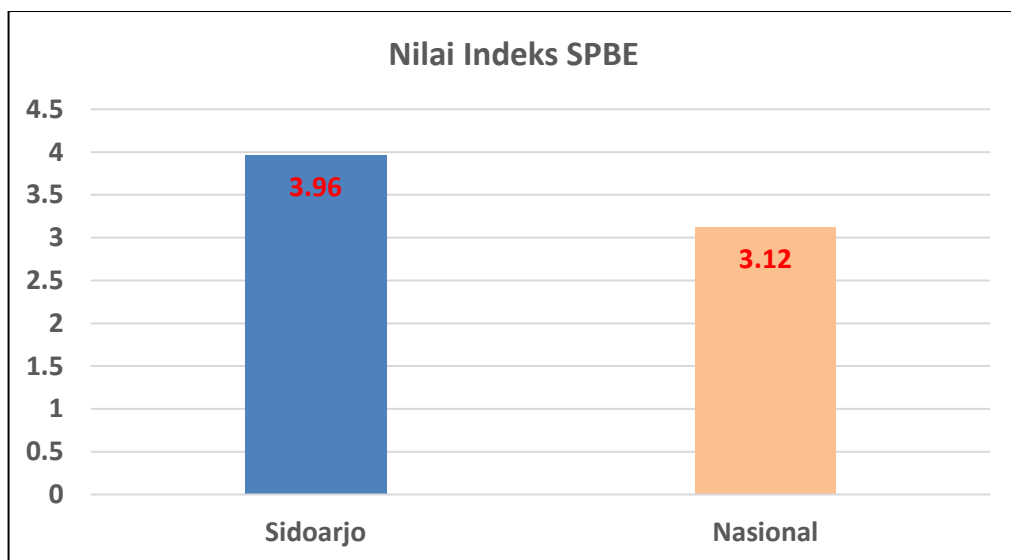
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,00	3,96	99,25	4,25	93,18	Sangat Baik

Sumber Data : Kementerian Kominfo

Dari LHE Kementerian Kominfo, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah 3,96. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menargetkan 4,00. Dengan demikian capaian Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 adalah 99,25 persen atau kurang 0,04 point, belum tercapai. Walaupun belum memenuhi target, capaian tahun ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut grafik perkembangan nilai indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 – 2024.



Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 4,25, capaian tahun ini masih kurang 0,19 poin atau sudah tercapai 93,18 persen. Sedangkan dibandingkan dengan Rata-Rata Nilai Indeks SPBE Nasional yaitu 3,12, Kabupaten Sidoarjo sudah lebih unggul 0,84 point di atas rata-rata Nasional.



Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, sebagai berikut :

1. Dalam aspek kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup pengaturan mengenai SPBE dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata Kelola SPBE; b. manajemen SPBE; c. audit teknologi informasi dan komunikasi; d. penyelenggara SPBE; dan e. pemantauan dan evaluasi SPBE.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, meliputi :

1. Banyaknya aplikasi yang sudah dibangun oleh Perangkat Daerah yang vendor dan Bahasa pemrogramannya berbeda-beda sehingga sulit untuk dilakukan integrasi;
2. Kurangnya koordinasi dan pemahaman para Tim SPBE terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Belum adanya konektivitas terhadap aplikasi instansi pusat yang disebabkan vendor dan bahasa pemrogramannya yang berbeda-beda.

Rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

- Mengembangkan **strategi digitalisasi** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

- Membangun atau meningkatkan **jaringan internet** yang stabil dan aman di seluruh instansi pemerintahan.

- Mengembangkan **pusat data dan cloud computing** untuk memastikan integrasi data yang lebih baik.

3. Penguatan Tata Kelola SPBE

- Menyusun **arsitektur SPBE** agar layanan digital lebih terstruktur dan saling terhubung.
- Membentuk **Tim Koordinasi SPBE** yang bertanggungjawab dalam implementasi dan evaluasi sistem.
- Mengadopsi standar keamanan informasi untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat.

4. Digitalisasi Pelayanan Publik

- Mengembangkan dan mengintegrasikan **portal layanan publik digital** agar masyarakat bisa mengakses layanan dengan mudah.
- Mengoptimalkan penggunaan **aplikasi dan platform digital**, seperti e-office, e-budgeting, dan e-reporting.
- Mempermudah proses **perizinan dan administrasi** secara online.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Mengadakan **pelatihan dan sertifikasi** bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam bidang teknologi dan digitalisasi.
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman ASN terhadap manfaat SPBE melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

6. Evaluasi dan Monitoring Berkala

- Melakukan **penilaian mandiri** terhadap pelaksanaan SPBE berdasarkan indikator nasional.
- Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki sistem yang masih kurang efektif.

A.1.6 Indikator Kinerja VI : Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
6.	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	100	Sangat Baik

Sumber Data : Kementerian PANRB

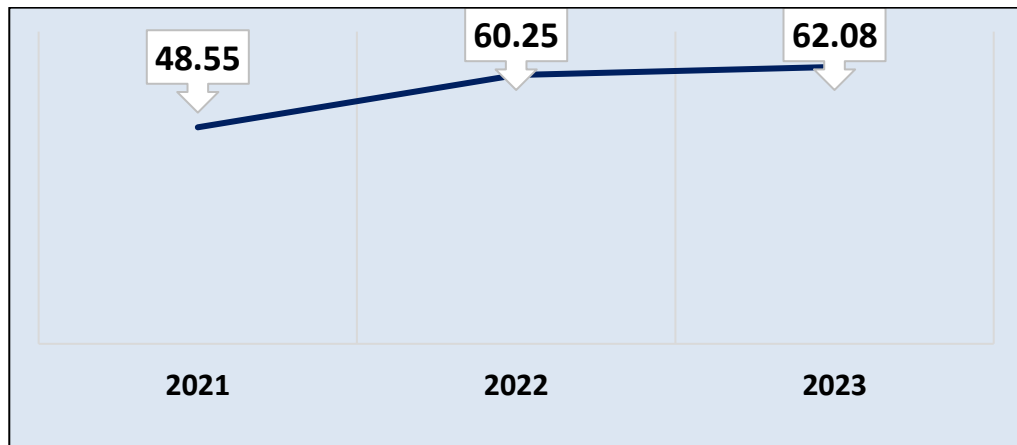
Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Pada Tahun 2024, sesuai target Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan kategori Sangat Inovatif sebagaimana dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023.

Berikut perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo :

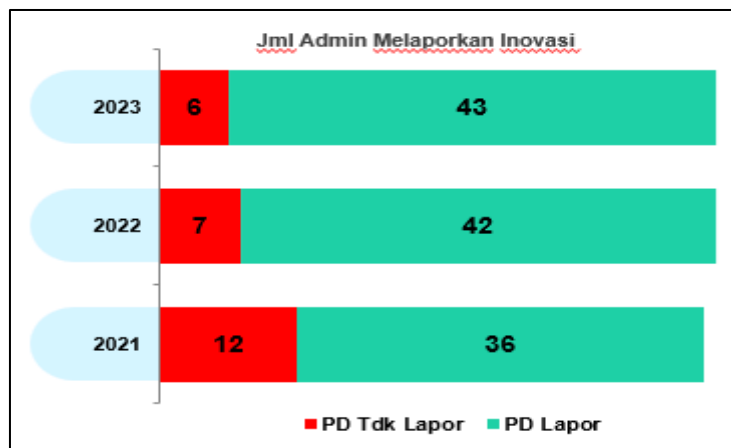
	2021	2022	2023	2024
Target	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF
Realisasi	INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF

Apabila digambarkan dalam grafik, sebagai berikut :



Sumber Data : Hasil IID Kemendagri

Meskipun capaian IID Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 meningkat, tetapi secara nasional peringkatnya turun dari peringkat 23 (2022) menjadi peringkat 27 (2023). Sedangkan perkembangan jumlah inovasi melalui partisipasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :



Partisipasi PD dalam pelaporan inovasi meningkat setiap tahun dari 75% (2021), menjadi 85,71% (2022), dan 87,76% (2023).

Upaya untuk optimalisasi pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2024, antara lain :

- a. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi
 - Mengingat 16 Kabupaten Terinovatif mengirimkan 200 inovasi

- Mengingat bbrp inidikator mandatory masih menggunakan bukti dukung seadanya
- 2. Mengoptimalkan Partipasi PD
Mengingat Perbup 31/2023 mengamanatkan bahwa 1 PD 1 inovasi tiap tahun
- 3. Meningkatkan Partisipasi Inovator
Menjadikan KISI sebagai agenda rutin tahunan dan wadah innovator mengaktualisasikan diri dan menyediakan stok inovasi daerah
- 4. Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Inovasi yg telah diterapkan didorong utk terus melakukan update/upgrade

A.1.7 Indikator Kinerja VII : Tingkat Maturitas SPIP

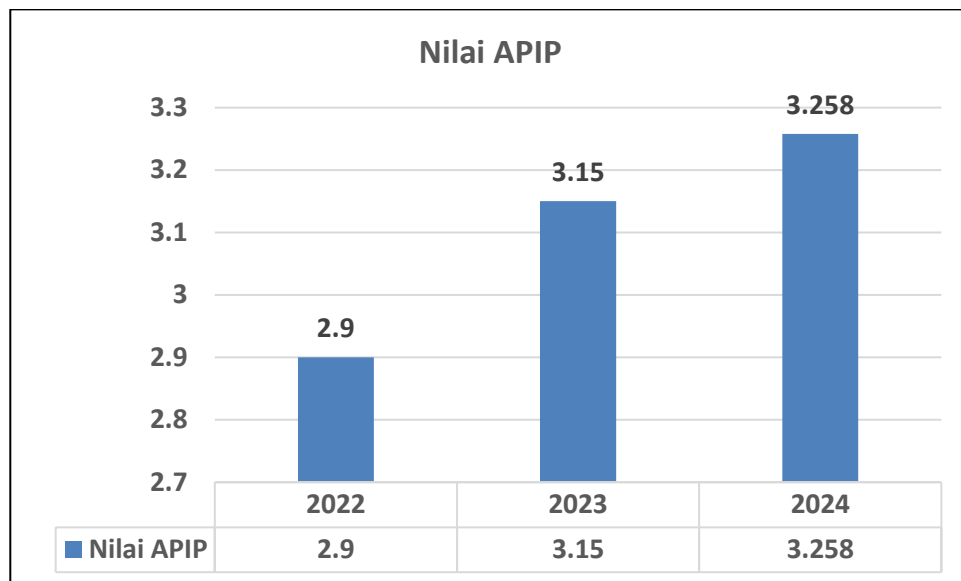
No	Indikator Kinerja Sasaran I	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	Level 3 Terdefinisi	100	Sangat Baik

Sumber Data : BPKP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian
4. Unsur informasi dan komunikasi
5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Hasil evaluasi BPKP tahun 2024, penyelenggaraan maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 3,258 Level 3 (terdefinisi).Capaian tersebut telah memenuhi target yang sudah ditetapkan dan mengalami peningkatan 0,108 poin dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,150. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 yaitu Level 3 (terdefinisi), maka Kabupaten Sidoarjo sudah mencapainya, demikian halnya dengan capaian Nasional. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Berikut perkembangan penyelenggaraan maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 – 2024, sebagai berikut :



Sebagaimana data grafik di atas, nilai APIP Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2022 sampai 2024 terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada dua tahun terakhir 2023 dan 2024 nilai APIP Kabupaten Sidoarjo telah berada pada Level 3 (terdefinisi). Hal ini mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan compliance auditing, performance auditing dan practice advisory antara lain:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities);
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (Area of Improvement), antara lain sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya memiliki SDM dengan kompetensi guna mengelola risiko atau manajemen risiko agar dapat melakukan identifikasi/penilaian risiko sesuai dengan proses yang benar;
2. Belum mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam penyusunan PPBR dengan baik yang disertai dengan langkah-langkah konkrit dalam perbaikan register risiko dan PPBR.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan dengan pengawasan berbasis risiko;

- Memutakhirkan risk register yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
- Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga/badan terkait untuk memutakhirkan register risiko dan PPBR.

A.2 Sasaran II: Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

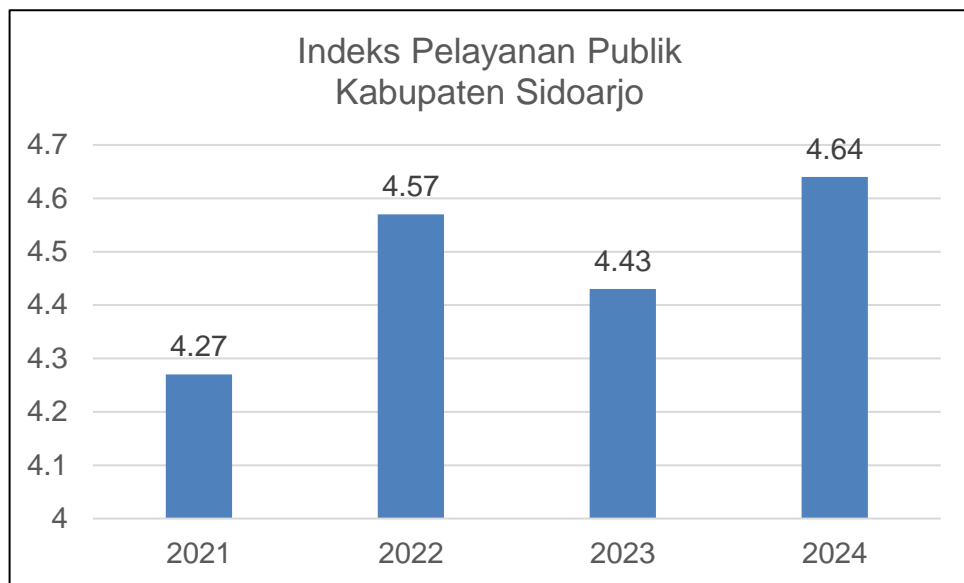
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
8.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A-	A-	100	A-	100	Sangat Berhasil

Sumber Data : Kementerian PNRB

Indikator Kinerja 8 : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu Perangkat Daerah satu Inovasi yang ditetapkan oleh Kabupaten Sidoarjo, sehingga dengan kebijakan tersebut banyak inovasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan dalam Kompetisi Regional maupun Nasional. Dengan banyaknya inovasi diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo terus lebih baik dan kepuasan masyarakat meningkat.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2024 mendapatkan nilai 4,64 atau kategori A (Prima). Hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan 4,10 atau katagori A- (Sangat Baik). Dibandingkan dengan capaian IPP tahun 2023 sebesar 4,43 sedangkan IPP tahun 2024 sebesar 4,64 maka Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo telah meningkat 0,21 poin. Adapun perkembangan Nilai IPP Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :



Dalam penilaian IPP untuk masing-masing Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, evaluator dari Kementerian PAN RB mengambil sampling 3 unit kerja sebagai locus penilaian serta setiap tahun locus nya berbeda, sehingga dengan demikian perkembangan nilai IPP untuk setiap tahunnya tidak bisa digunakan sebagai tren capaian kinerja. Untuk tahun 2024, sebagai locus penilaian IPP di Kabupaten Sidoarjo adalah RSUD Notopuro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial.

Kalau dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan katagori A- (Sangat Baik), maka nilai IPP Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sudah melampaui target karena nilai IPP tahun ini adalah 4,64 atau katagori A (Prima). Apabila dibandingkan nilai rata-rata Nasional, sampai laporan ini disusun belum ada rilis dari Kementerian PANRB.

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkenaan dengan capaian nilai IPP sebesar 4,64 atau Prima tersebut, antara lain :

1. Terus berupaya memenuhi semua kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang layak dan nyaman sesuai standar pelayanan;
2. Sidoarjo memiliki 2 Mal Pelayanan Publik;
3. Hampir semua layanan sudah berbasis elektronik, sehingga kecepatan, kemudahan, transparansi dan akuntabilitas layanan dapat terjaga;
4. Setiap layanan telah memiliki standar pelayanan yang jelas dan ter-publis di setiap lokasi layanan maupun pada web dan media sosial lainnya;
5. Peningkatan kompetensi SDM, dalam rangka menjaga profesionalitas SDM;
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan pada seluruh unit kerja;
7. Melakukan penilaian PEKPPP pada 111 unit kerja, termasuk puskesmas dan kelurahan;
8. Pemberian penghargaan pada unit kerja yang prestasi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pelayanan publik, antara lain :

1. Sarana dan prasarana layanan pada unit kerja belum semuanya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan, terutama diantaranya sarana untuk para penyandang disabilitas;
2. Aplikasi-aplikasi yang ada belum semua dapat diintegrasikan;
3. Kompetensi dan profesionalitas SDM perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana unit kerja yang masih belum sesuai standar;
2. Menghimpun dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi layanan dalam satu portal;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM melalui Bimtek dan pelatihan;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan pada seluruh unit kerja;
5. Melakukan penilaian PEKPPP pada 111 unit kerja, termasuk puskesmas dan kelurahan;
6. Pemberian penghargaan pada unit kerja yang prestasi.

Tujuan Kedua:					
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.					
Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi	Angka	6,78	5,540	81,71	BPS
Indeks Gini	Indeks	0,345	0,327	105,22	BPS

D. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.648.924.599.197,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.458.653.825.996,00	1.394.776.724.000,00	95,62
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	834.061.439.089,00	791.633.348.150,00	94,91

	Program Pengelolaan Pendidikan	623.624.786.907,00	602.189.928.350,00	96,56
	Program Pengendalian Perijinan	5.000.000,00	4.940.000,00	98,80
	Program Pengembangan Kebudayaan	743.910.000,00	731.870.000,00	98,38
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	218.690.000,00	216.637.500,00	99,06
2	DINAS KESEHATAN	556.323.737.975,00	534.495.511.592,50	96,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	322.501.218.611,00	317.544.161.484,50	98,46
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	215.739.708.992,00	199.826.240.938,00	92,62
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.552.003.352,00	4.725.187.183,00	85,11
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	556.386.420,00	443.245.000,00	79,66
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.974.420.600,00	11.956.676.987,00	99,85
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) R.T NOTOPURO SIDOARJO	897.476.388.372,00	792.505.203.219,92	88,30
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	872.147.874.572,00	768.205.148.340,92	88,08
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25.328.513.800,00	24.300.054.879,00	95,94
4	RUMAH SAKIT SIDOARJO BARAT	157.930.586.551,00	147.888.608.180,00	93,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	118.953.186.481,00	109.790.179.161,00	92,30
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38.977.400.070,00	38.098.429.019,00	97,74
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	377.299.190.637,00	313.577.284.420,00	83,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.442.402.534,00	18.823.079.432,00	92,08
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.479.432.201,00	10.044.271.406,00	95,85
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	31.656.486.506,00	28.646.471.712,00	90,49
	Program Penyelenggaraan Jalan	314.720.869.396,00	256.063.461.870,00	81,36
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	97.696.859.276,00	86.600.461.519,00	88,64
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.396.800.735,00	14.337.382.300,00	77,93
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.789.239.143,00	14.742.850.714,00	87,81
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	26.086.655.390,00	24.405.838.761,00	93,56

	Program Penataan Bangunan Gedung	7.563.801.823,00	5.947.073.560,00	78,63
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	752.375.000,00	500.872.205,00	66,57
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.946.200.934,00	1.823.036.600,00	93,67
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.750.000,00	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.513.373.526,00	10.746.722.333,00	93,34
	Program Pengembangan Perumahan	3.936.405.005,00	3.815.219.703,00	96,92
	Program Kawasan Permukiman	14.000.000,00	-	-
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.065.800.000,00	2.055.607.619,00	99,51
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.596.847.720,00	8.216.357.724,00	95,57
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	21.110.000,00	-	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.432.134.670,00	27.431.936.415,00	96,48
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.655.387.295,00	16.206.048.583,00	97,30
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.776.747.375,00	11.225.887.832,00	95,32
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.053.767.423,00	21.906.449.260,05	91,07
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.731.918.446,00	13.581.302.891,05	92,19
	Program Penanggulangan Bencana	1.759.076.570,00	981.570.109,00	55,80
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.562.772.407,00	7.343.576.260,00	97,10
9	DINAS SOSIAL	47.594.650.844,00	45.591.691.652,00	95,79
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.025.394.915,00	7.290.447.826,00	90,84
	Program Pemberdayaan Sosial	7.260.086.774,00	6.621.827.637,00	91,21
	Program Rehabilitasi Sosial	8.316.233.342,00	8.116.471.328,00	97,60
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.031.850.719,00	22.665.208.461,00	98,41
	Program Penanganan Bencana	943.692.504,00	890.536.400,00	94,37
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	17.392.590,00	7.200.000,00	41,40

10	DINAS TENAGA KERJA	15.851.228.906,00	14.748.002.335,00	93,04
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.459.953.937,00	8.076.809.855,00	95,47
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	107.482.000,00	105.106.000,00	97,79
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.856.953.461,00	3.276.873.980,00	84,96
	Program Penempatan Tenaga Kerja	858.007.369,00	814.805.300,00	94,96
	Program Hubungan Industrial	2.561.382.139,00	2.467.957.200,00	96,35
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7.450.000,00	6.450.000,00	86,58
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	36.157.887.454,00	35.220.358.661,00	97,41
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.362.957.493,00	6.988.815.232,00	94,92
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	196.970.749,00	196.132.500,00	99,57
	Program Perlindungan Perempuan	703.532.142,00	668.075.247,00	94,96
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	261.320.000,00	243.203.925,00	93,07
	Program Perlindungan Khusus Anak	182.855.000,00	179.925.000,00	98,40
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	26.259.978.249,00	25.786.615.936,00	98,20
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	379.074.400,00	358.049.400,00	94,45
	Program Pengendalian Kependudukan	811.199.421,00	799.541.421,00	98,56
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	39.766.273.094,00	37.953.999.308,00	95,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.867.960.094,00	31.408.326.303,00	95,56
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.000.000,00	4.650.000,00	93,00
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.144.856.325,00	1.063.258.200,00	92,87
	Program Penangan Kerawanan Pangan	175.000.000,00	168.498.000,00	96,28
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	146.200.000,00	125.659.500,00	85,95
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.697.923.200,00	2.588.574.005,00	95,95
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	328.418.635,00	312.177.780,00	95,05
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.046.322.522,00	1.965.350.020,00	96,04

	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	344.592.318,00	307.818.000,00	89,33
	Program Perizinan Usaha Pertanian	5.000.000,00	4.687.500,00	93,75
	Program Penyuluhan Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	141.269.793.371,00	117.510.899.604,00	83,18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.937.221.793,00	74.854.739.177,00	87,10
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.917.373.299,00	2.526.349.176,00	86,60
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	43.351.449.532,00	31.877.320.731,00	73,53
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	131.359.200,00	92.428.036,00	70,36
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	310.671.000,00	240.461.704,00	77,40
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	295.102.239,00	213.743.568,00	72,43
	Program Pengelolaan Persampahan	8.321.866.308,00	7.701.107.212,00	92,54
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	16.502.377.174,00	15.492.665.809,00	93,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.994.186.351,00	14.285.960.629,00	95,28
	Program Pendaftaran Penduduk	204.817.569,00	101.510.000,00	49,56
	Program Pencatatan Sipil	321.809.030,00	234.436.000,00	72,85
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	974.839.224,00	870.759.180,00	89,32
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6.725.000,00	-	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83.717.455.408,00	82.003.025.493,00	97,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.353.734.178,00	6.495.704.151,00	88,33
	Program Penataan Desa	19.526.080,00	17.244.000,00	88,31
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	260.256.053,00	218.910.203,00	84,11
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.276.005.215,00	9.897.424.065,00	96,32

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	65.807.933.882,00	65.373.743.074,00	99,34
16	DINAS PERHUBUNGAN	123.466.592.176,00	112.036.317.338,00	90,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.619.534.929,00	16.753.549.156,00	95,09
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	99.936.161.337,00	89.447.941.567,00	89,51
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	5.882.685.910,00	5.806.690.615,00	98,71
	Program Pengelolaan Pelayaran	28.210.000,00	28.136.000,00	99,74
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.155.869.943,00	31.094.753.106,00	96,70
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.731.119.413,00	12.148.052.319,00	95,42
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.627.499.762,00	4.398.802.488,00	95,06
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	13.531.879.038,00	13.340.591.569,00	98,59
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	172.000.000,00	170.682.500,00	99,23
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.093.371.730,00	1.036.624.230,00	94,81
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	17.052.200.817,00	16.268.486.738,00	95,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.207.099.034,00	7.873.427.963,00	95,93
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	26.380.160,00	26.205.000,00	99,34
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	26.380.160,00	26.205.000,00	99,34
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10.966.850,00	10.859.000,00	99,02
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	189.039.100,00	181.660.770,00	96,10
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	849.320.325,00	804.543.126,00	94,73
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4.778.802.876,00	4.511.706.060,00	94,41
	Program Pengembangan UMKM	2.964.212.312,00	2.833.879.819,00	95,60
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.730.722.896,00	16.518.952.610,00	93,17
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.818.921.646,00	12.095.219.444,00	94,35
	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.381.499.350,00	2.076.794.700,00	87,21
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	633.912.000,00	625.679.866,00	98,70

	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.000.000,00	19.500.000,00	54,17
	Program Promosi Penanaman Modal	562.000.000,00	534.500.000,00	95,11
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.298.389.900,00	1.167.258.600,00	89,90
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	54.567.646.871,00	53.010.216.866,00	97,15
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.892.191.970,00	10.297.548.012,00	94,54
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	8.042.974.080,00	7.857.371.216,00	97,69
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	999.999.874,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	32.808.518.771,00	32.114.654.153,00	97,89
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.534.135.600,00	1.478.620.718,00	96,38
	Program Pemasaran Pariwisata	104.996.450,00	102.371.893,00	97,50
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5.000.000,00	-	-
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	179.830.000,00	159.651.000,00	88,78
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.914.920.981,00	11.344.062.707,00	95,21
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.245.481.416,00	9.726.092.624,00	94,93
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.133.843.078,00	1.093.706.183,00	96,46
	Program Pengelolaan Arsip	520.655.646,00	510.566.150,00	98,06
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.990.000,00	4.961.500,00	99,43
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.986.608,00	4.033.750,00	80,89
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	4.964.233,00	4.702.500,00	94,73
22	DINAS PERIKANAN	16.631.805.280,00	15.621.460.465,00	93,93
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.378.664.240,00	7.166.977.916,00	97,13
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	87.596.000,00	83.831.600,00	95,70
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.880.899.593,00	7.249.641.606,00	91,99
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	119.554.800,00	96.360.852,00	80,60
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.165.090.647,00	1.024.648.491,00	87,95

23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	63.087.554.544,00	59.259.527.089,00	93,93
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.151.606.904,00	26.351.744.380,00	97,05
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25.932.469.360,00	23.820.224.484,00	91,85
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	66.575.000,00	54.575.000,00	81,98
	Program Pengembangan Ekspor	2.572.252.600,00	2.484.668.900,00	96,60
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	298.803.541,00	278.017.352,00	93,04
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.907.622.139,00	6.170.554.473,00	89,33
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	153.000.000,00	97.150.000,00	63,50
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.225.000,00	2.592.500,00	49,62
24	SEKRETARIAT DAERAH	100.929.504.677,00	92.144.591.140,00	91,30
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.097.058.737,00	71.159.325.352,00	92,30
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.253.411.146,00	17.063.398.934,00	88,63
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.579.034.794,00	3.921.866.854,00	85,65
25	SEKRETARIAT DPRD	132.228.033.235,00	103.521.968.396,00	78,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.626.204.836,00	55.433.120.422,00	88,51
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	69.601.828.399,00	48.088.847.974,00	69,09
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.639.962.233,00	19.813.882.962,00	96,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.882.518.894,00	13.386.866.930,00	96,43
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.361.453.302,00	2.193.810.788,00	92,90
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.617.793.179,00	3.492.443.579,00	96,54
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	778.196.858,00	740.761.665,00	95,19
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	677.541.189.743,00	667.489.786.441,00	98,52
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.915.921.861,00	18.094.097.468,00	95,66
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	654.876.632.724,00	646.056.991.341,00	98,65
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.748.635.158,00	3.338.697.632,00	89,06

28	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	51.221.967.533,00	39.905.786.146,00	77,91
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.675.815.903,00	33.438.717.402,00	84,28
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.546.151.630,00	6.467.068.744,00	56,01
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19.074.854.425,00	17.562.464.375,00	92,07
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.609.791.313,00	13.191.623.199,00	96,93
	Program Kepegawaian Daerah	3.019.670.081,00	2.134.711.179,00	70,69
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.445.393.031,00	2.236.129.997,00	91,44
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	156.001.992.881,00	154.285.625.396,00	98,90
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.839.346.091,00	5.554.316.532,00	95,12
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.495.802.800,00	1.445.922.949,00	96,67
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.222.857.000,00	12.853.355.000,00	97,21
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	134.187.072.020,00	133.285.618.213,00	99,33
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.236.914.970,00	1.126.412.702,00	91,07
31	INSPEKTORAT	20.477.608.955,00	19.621.388.267,00	95,82
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.422.686.451,00	18.813.164.677,00	96,86
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.054.922.504,00	808.223.590,00	76,61
32	KECAMATAN SIDOARJO	31.675.771.067,00	30.593.089.472,00	96,58
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.515.826.757,00	22.632.551.384,00	96,24
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	386.105.000,00	357.305.000,00	92,54
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.581.789.310,00	7.434.083.088,00	98,05
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.500.000,00	19.625.000,00	91,28
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	164.250.000,00	143.225.000,00	87,20
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
33	KECAMATAN CANDI	5.434.536.466,00	5.195.007.088,00	95,59

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.852.003.985,00	4.706.772.088,00	97,01
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	452.167.481,00	368.210.000,00	81,43
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93.200.000,00	84.480.000,00	90,64
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.700.000,00	31.080.000,00	95,05
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.465.000,00	4.465.000,00	100,00
34	KECAMATAN BUDURAN	6.113.734.928,00	5.857.744.555,00	95,81
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.030.307.928,00	4.903.136.055,00	97,47
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	355.518.000,00	269.262.500,00	75,74
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	375.920.000,00	355.221.000,00	94,49
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.309.000,00	58.150.000,00	99,73
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	293.680.000,00	271.975.000,00	92,61
35	KECAMATAN WONOAYU	5.250.397.061,00	5.093.213.121,00	97,01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.726.163.641,00	4.632.104.921,00	98,01
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	368.419.420,00	307.713.200,00	83,52
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	56.539.000,00	55.639.000,00	98,41
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94.525.000,00	93.006.000,00	98,39
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
36	KECAMATAN KRIAN	12.078.041.308,00	11.727.267.592,00	97,10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.422.173.111,00	9.172.495.576,00	97,35
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	360.550.837,00	286.973.822,00	79,59
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	83.992.227,00	82.386.975,00	98,09
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.967.588,00	49.209.938,00	96,55
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.543.820,00	15.143.500,00	97,42
	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	2.144.813.725,00	2.121.057.781,00	98,89
37	KECAMATAN PORONG	10.906.359.626,00	10.382.695.978,00	95,20

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.214.356.626,00	8.811.320.062,00	95,63
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	472.095.000,00	364.202.500,00	77,15
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.146.333.000,00	1.134.390.916,00	98,96
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	4.275.000,00	85,50
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.575.000,00	63.515.000,00	99,91
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.992.500,00	99,85
38	KECAMATAN KREMBUNG	5.436.844.670,00	5.086.972.837,00	93,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.954.529.670,00	4.654.773.837,00	93,95
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	324.910.000,00	277.985.000,00	85,56
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.925.000,00	83.040.000,00	96,64
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.730.000,00	66.424.000,00	99,54
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
39	KECAMATAN JABON	4.603.526.819,00	4.340.625.302,00	94,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.122.387.319,00	3.935.984.002,00	95,48
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.410.000,00	177.542.500,00	80,19
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.917.500,00	76.015.000,00	96,32
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	176.795.000,00	147.670.000,00	83,53
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.017.000,00	3.413.800,00	84,98
40	KECAMATAN BALONGBENDO	6.112.087.206,00	5.827.558.657,00	95,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.647.688.506,00	5.463.164.657,00	96,73
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	274.167.500,00	199.718.000,00	72,85
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.256.200,00	81.145.000,00	95,18
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	99.725.000,00	79.468.500,00	79,69
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.250.000,00	4.062.500,00	77,38
41	KECAMATAN TARIK	5.389.970.877,00	5.117.131.431,00	94,94

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.692.141.977,00	4.519.241.181,00	96,32
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	372.590.000,00	301.212.750,00	80,84
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	270.387.500,00	250.027.500,00	92,47
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.976.400,00	42.390.000,00	92,20
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.875.000,00	4.260.000,00	48,00
42	KECAMATAN TAMAN	20.850.819.062,00	20.357.457.606,00	97,63
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.834.512.817,00	15.502.398.471,00	97,90
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	413.327.500,00	335.980.000,00	81,29
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	75.475.000,00	74.637.500,00	98,89
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106.725.000,00	86.775.000,00	81,31
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.417.453.745,00	4.354.341.635,00	98,57
43	KECAMATAN WARU	5.916.164.208,00	5.719.512.247,00	96,68
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.347.210.447,00	5.188.128.566,00	97,02
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	422.880.713,00	390.971.935,00	92,45
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	54.438.145,00	52.963.805,00	97,29
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71.082.120,00	70.782.120,00	99,58
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.552.783,00	16.665.821,00	81,09
44	KECAMATAN GEDANGAN	5.723.773.682,00	5.501.000.726,00	96,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.133.210.432,00	4.969.490.876,00	96,81
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	166.325.000,00	125.065.000,00	75,19
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	119.626.250,00	116.940.000,00	97,75
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.904.500,00	39.792.500,00	99,72
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.707.500,00	249.712.350,00	94,34
45	KECAMATAN SEDATI	5.631.324.004,00	5.247.888.145,00	93,19

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.069.387.164,00	4.756.001.645,00	93,82
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	240.292.840,00	199.878.500,00	83,18
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93.700.000,00	90.955.000,00	97,07
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	124.994.000,00	99.993.000,00	80,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.950.000,00	101.060.000,00	98,16
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	5.951.410.533,00	5.586.190.254,00	93,86
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.513.702.533,00	5.257.375.254,00	95,35
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	329.270.000,00	222.265.000,00	67,50
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	38.750.000,00	38.750.000,00	100,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.988.000,00	62.100.000,00	97,05
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
47	KECAMATAN TULANGAN	5.979.064.781,00	5.766.188.255,00	96,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.532.878.981,00	5.360.637.255,00	96,89
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	409.825.000,00	371.066.000,00	90,54
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.975.000,00	11.100.000,00	85,55
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.935.800,00	16.935.000,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00
48	KECAMATAN PRAMBON	6.302.720.000,00	6.108.666.967,00	96,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.905.810.000,00	5.790.580.967,00	98,05
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	317.172.500,00	247.342.500,00	77,98
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43.400.000,00	35.607.000,00	82,04
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.137.500,00	29.727.500,00	98,64
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.200.000,00	5.409.000,00	87,24
49	KECAMATAN SUKODONO	6.119.468.558,00	5.925.234.412,00	96,83
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.636.073.558,00	5.485.912.712,00	97,34

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	297.997.500,00	271.921.700,00	91,25
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.150.000,00	59.090.000,00	98,24
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.647.500,00	100.790.000,00	85,67
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.600.000,00	7.520.000,00	98,95
	TOTAL ANGGARAN	5.648.924.599.197,00	5.246.635.536.155,47	92,88

Realisasi anggaran tahun 2024 pada 120 program/kegiatan tersebut di atas, rata-rata realisasi capaian anggaran adalah 93,93% dengan capaian kinerja rata-rata 107,07%, artinya penggunaan anggaran telah memenuhi target kinerja lebih dari 100%. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tersebut telah terjadi efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran sebesar 1,14% mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif. Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	2024
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2024

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
					Pembila ng	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) JumlahWarga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.307	60.307	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6Tahun
2	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	308.401	308.401	100 %	Jumlah Warga Kabupaten/NegaraUsia 7-15 Tahunyangberpartisipasidalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) JumlahWarga Kabupaten Usia 7-15Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.778	3.778	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaika npendidikan dasar dan atau menengah

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
KAB. SIDOARJO			623,624,786,907	602,193,110,568	96.56 %
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			623,624,786,907	602,193,110,568	96.56 %
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629		269,897,043,408	261,767,929,260	96.99 %
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<u>2,210,184,398</u>	<u>2,027,350,959</u>	91.73 %
	2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	<u>6,277,050</u>	<u>6,177,000</u>	98.41 %
	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<u>314,536,200</u>	<u>306,717,300</u>	97.51 %
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	<u>12,880,426,400</u>	<u>12,393,049,139</u>	96.22 %
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	<u>9,074,224,000</u>	<u>7,818,365,000</u>	86.16 %
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<u>65,200,000</u>	<u>51,000,000</u>	78.22 %
	7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	<u>217,538,048,000</u>	<u>215,923,160,000</u>	99.26 %
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	<u>120,700,000</u>	<u>115,575,000</u>	95.75 %
	9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<u>72,000,000</u>	<u>64,575,000</u>	89.69 %
	10	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	<u>23,833,000</u>	<u>23,800,000</u>	99.86 %
	11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	<u>5,309,791,500</u>	<u>4,373,574,551</u>	82.37 %
	12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	<u>92,850,000</u>	<u>16,400,000</u>	17.66 %
	13	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	<u>940,545,000</u>	<u>850,115,000</u>	90.39 %
	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<u>21,248,427,860</u>	<u>17,798,070,311</u>	83.76 %
JUMLAH INDIKATOR			269,897,043,408	261,767,929,260	96.99 %
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647		221,888,041,036	212,650,545,636	95.84 %
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<u>30,167,431,361</u>	<u>25,228,757,105</u>	83.63 %
	2	Pengadaan Mebel Sekolah	<u>630,651,000</u>	<u>314,910,000</u>	49.93 %
	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<u>297,513,600</u>	<u>278,442,500</u>	93.59 %
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<u>1,743,050,400</u>	<u>1,526,168,356</u>	87.56 %
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<u>6,259,787,500</u>	<u>5,316,562,500</u>	84.93 %
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<u>235,475,000</u>	<u>224,425,000</u>	95.31 %
	7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	<u>182,067,194,000</u>	<u>179,316,590,000</u>	98.49 %
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	<u>36,075,000</u>	<u>29,985,000</u>	83.12 %

	9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	32,233,000	21,250,000	65.93 %
	10	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	381,912,500	361,837,500	94.74 %
	11	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	34,950,000	29,850,000	85.41 %
	12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,767,675	1,767,675	100.00 %
JUMLAH INDIKATOR			221,888,041,036	212,650,545,636	95.84 %
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412		76,094,032,326	74,566,667,383	97.99 %
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3,618,444,492	3,574,842,952	98.80 %
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	29,770,278,693	28,969,253,924	97.31 %
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	692,229,141	646,746,350	93.43 %
	4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	41,874,330,000	41,256,399,157	98.52 %
	5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	17,175,000	10,150,000	59.10 %
	6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	121,575,000	109,275,000	89.88 %
JUMLAH INDIKATOR			76,094,032,326	74,566,667,383	97.99 %
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444		55,745,670,137	53,207,968,289	95.45 %
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	4,365,032,500	4,355,845,000	99.79 %
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43,309,072,500	41,435,972,500	95.68 %
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	113,415,000	97,345,150	85.83 %
	4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,653,520,000	4,264,507,214	91.64 %
	5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	558,721,838	516,889,331	92.51 %
	6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2,613,480,799	2,435,581,594	93.19 %
	7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	132,427,500	101,827,500	76.89 %
JUMLAH INDIKATOR			55,745,670,137	53,207,968,289	95.45 %
JUMLAH PROGRAM			623,624,786,907	602,193,110,568	96.56 %

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain:

Mata Anggaran		Besar Anggaran
KAB. SIDOARJO		233,202,757,525
PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	23,715,070,000
2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	4,786,875,695
3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	13,905,000
4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	13,757,431,956
PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR		
5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	118,344,681,759
6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	650,500,619
7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	12,163,541,669
8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	27,450,818,947
9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	7,023,656,956
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN		
10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	3,599,280,000
11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	0
12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	872,182,569
13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	1,317,912,355
14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	19,506,900,000

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR
1	Sekolah Dasar Negeri	464	4.131	110.829	6.033
2	Sekolah Dasar Swasta dan Sederajat	122	1.521	34.113	2.047
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	47	1.264	42.273	1.988
4	Sekolah Menengah Pertama Swasta	143	2.676	34.241	4.132
5	Sekolah PAUD Negeri	2	15	276	19

6	Sekolah PAUD Swasta	1.625	5.669	64.347	5.034
---	---------------------	-------	-------	--------	-------

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antaralain :

1. Dalam Proses Pengumpulan data :

Sumber data dari :

- a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- b. Data kependudukan dari Dispendukcapil.
- c. Data Emis (Kemenag)

Terdapat beberapa permasalahan dari pengumpulan data, diantaranya;

- a. Data kependudukan yang diperlukan untuk menghitung APM, APK, APS berdasarkan klasifikasi usia PAUD 4-6 tahun, 5-6 tahun, SD sederajat 7-12 tahun, SMP sederajat 13-15 tahun, Kesetaraan 7-18 tahun. Data-data sesuai kriteria di atas tidak sesuai dengan aplikasi Dispendukcapil (SIK)
- b. Data siswa dari Emis kemenag kita tidak mendapatkan akses, untuk mendapatkan data siswa RA, MI, MTs secara manual

2. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan :

Perhitungan kebutuhan berdasar Renstra OPD. Pagu anggaran bersifat dinamis disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD)

3. Dalam Pelaksanaan kegiatan :

Pada pelaksanaan kegiatan seringkali terkendala faktor teknis, misal harus menyiapkan peraturan bupati, atau SK bupati yang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya sehingga kegiatan menunggu hingga selesainya Perbub atau SK sebagai dasar pelaksanaan dan perncairan anggaran.

4. Dalam Perencanaan Dan Penganggaran :

Terjadinya perubahan kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan anggaran, sebagai contoh adanya rasionalisasi anggaran di tahun 2023 dan 2024, sehingga terdapat kegiatan yang harus ditunda ataupun tidak dilaksanakan. Pada sub kegiatan penerapan SPM banyak yang tidak sesuai dengan sub kegiatan pada DPA secara spesifik

4.2 Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang SPM Bidang Kesehatan.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Kesehatan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

4.2.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2024

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	31425	31425	100%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	31447	31447	100%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	31387	31387	100%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	31387	31387	100%	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	298302	298302	100%	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	1451816	1451816	100%	Jumlah pengunjung usia 15 tahun keatas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan Kesehatan pada	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	253704	253704	100%	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
	Usia Lanjut							Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	547109	547109	100%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	77905	77905	100%	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	5224	5224	100%	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	≥ 80%	Dinas Kesehatan	32699	32699	100%	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	38606	38606	100%	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan Antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-2	-3	-4	-6	-7	-8
KAB. SIDOARJO			10,598,330,191	10,439,826,509	98.50 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			10,598,330,191	10,439,826,509	98.50 %
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237		10,598,330,191	10,439,826,509	98.50 %
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	<u>1,378,022,600</u>	<u>1,367,900,798</u>	99.27 %
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	<u>393,307,500</u>	<u>383,120,000</u>	97.41 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	<u>618,578,549</u>	<u>563,287,015</u>	91.06 %
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	<u>39,012,500</u>	<u>38,712,500</u>	99.23 %
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<u>776,725,000</u>	<u>763,965,000</u>	98.36 %
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	<u>27,490,000</u>	<u>23,403,350</u>	85.13 %
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	<u>22,967,500</u>	<u>18,880,850</u>	82.21 %
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	<u>15,250,000</u>	<u>15,241,000</u>	99.94 %
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	<u>4,026,862,742</u>	<u>4,023,470,000</u>	99.92 %
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	<u>43,530,000</u>	<u>43,435,000</u>	99.78 %
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<u>2,985,588,600</u>	<u>2,948,761,500</u>	98.77 %
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<u>270,995,200</u>	<u>249,649,496</u>	92.12 %
JUMLAH INDIKATOR			10,598,330,191	10,439,826,509	98.50 %
JUMLAH PROGRAM			10,598,330,191	10,439,826,509	98.50 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	PAGU
1	ABPD Kabupaten Sidoarjo	5,258,517,240,058
2	Alokasi Anggaran Satker PD	556,323,737,975
3	Alokasi Anggaran SPM	556,323,737,975
	APBD	294,786,525,130
	APBD Murni	224,516,319,997
	APBD DAU	13,169,991,724
	APBD DAK FISIK	3,834,195,332
	APBD DAK NON FISIK	37,489,627,000
	DANA BAGI HASIL	15,776,391,077

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

NO	JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH TEMPAT TIDUR	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Tenaga Teknis Lainnya
1	RS Umum	25	3.465	743	1016	444	1460	2965	2919
2	RS Khusus	7							
3	Puskesmas Rawat Inap	14	138						
4	Puskesmas Non Rawat Inap	17							
5	Puskesmas Keliling	5							
6	Puskesmas Pembantu	52							
7	Apotek	427							
8	Klinik Pratama	187							
9	Klinik Utama	15							

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan yang adadalampelaksanaan SPM di Bidang Kesehatan antarlain :

a. Dalam Proses Pengumpulan data :

Sumber data dari :

- a. Menggunakan data proyeksi yang telah dihitung oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin Kemenkes RI)
- b. Data Riil yang di yakini benar

b. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan :

Penghitungan kebutuhan disesuaikan dengan data sasaran

Solusi yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan kunjungan rumah kepada lansia dengan kemandirian C sesuai dengan pendataan yang telah dilaksanakan
2. Meningkatkan kerja sama dengan jejaring dengan memberikan format laporan kunjungan lansia untuk diisi setiap bulan dan dilaporkan kepuskesmas
3. Pada saat pelayanan posyandu dilakukan sosialisasi/Ojt tentang ceklis Pengkajian paripurna Pasien Geriatri (P3G) pada kader

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2024

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
					Penyebut	Pembilang	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	PDAM Sidoarjo dan P2CKTR	20469	20469	100 %	Jumlah Rumah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Seluruh Rumah warga kabupaten
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Bina marga, dan Sumber Daya Air	22308	22308	100 %	Jumlah Rumah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic Seluruh Rumah warga kabupaten

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-2	-3	-4	-6	-7	-8
KAB. SIDOARJO			35,186,039,878	29,080,233,014	82.65 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			18,396,800,735	14,337,382,300	77.93 %
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638		18,396,800,735	14,337,382,300	77.93 %
	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<u>29,981,810</u>	<u>22,650,000</u>	75.55 %
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<u>527,522,478</u>	<u>97,445,157</u>	18.47 %
	3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<u>1,785,739,465</u>	<u>1,485,143,390</u>	83.17 %
	4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<u>16,053,381,982</u>	<u>12,732,143,753</u>	79.31 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			16,789,239,143	14,742,850,714	87.81 %
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559		16,789,239,143	14,742,850,714	87.81 %
	1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	<u>276,610,413</u>	<u>259,151,839</u>	93.69 %
	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	<u>1,133,642,730</u>	<u>1,103,189,552</u>	97.31 %
	3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	<u>15,350,986,000</u>	<u>13,380,509,323</u>	87.16 %
	4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	<u>28,000,000</u>	<u>0</u>	0%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	PAGU
----	-----------	------

1	ABPD Kabupaten Sidoarjo	5,258,517,240,058
2	Alokasi Anggaran Satker PD	97,696,859,276
3	Alokasi Anggaran SPM	35,186,039,878
	APBD	35,186,039,878
	APBD Murni	10,701,531,400
	APBD DAK FISIK	24,484,508,478

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	3 PNS dan 2 NON PNS	P2CKTR
		651 NON PNS	PDAM
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2 PNS dan 19 NON PNS	P2CKTR

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain :

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

- a. Data layanan SPAM Pedesaan belum terdata dalam RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum).
- b. Data Lokasi Prioritas Layanan SPALD-S/ SPALD-T belum terdata dalam SSK (Strategi Sanitasi Kota).

2. Penghitugan Kebutuhan

- a. Area layanan dalam RISPAM dan SSK belum terinci.

3. Perencanaan dan Anggaran

- a. Pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan layanan, karena pagu bersifat dinamis.

4. Pelaksanaan

- a. Layanan air bersih dan sanitasi dari pemerintah murni yang terbangun belum memenuhi target SPM adapun masih banyak yang di bantu oleh pelayanan Swasta.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2024

4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya

dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DP2CKTR	163	163	100%	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni — Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang rumahnya tidak layak huni karena bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkenai relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	DP2CKTR	0	0	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang terkenai relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni — Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkenai relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara lain:

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	2,864,725,000	2,820,320,350	98.45 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	400,000,000	398,695,350	99.67 %
	1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2024348	400,000,000	398,695,350	99.67 %
	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	400,000,000	398,695,350	99.67 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	2,464,725,000	2,421,625,000	98.25 %
	1 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2,464,725,000	2,421,625,000	98.25 %

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	PAGU
1	ABPD Kabupaten Sidoarjo	5,258,517,240,058
2	Alokasi Anggaran Satker PD	97,696,859,276
3	Alokasi Anggaran SPM	45,612,409
	APBD	45,612,409
	APBD DAU	45,612,409

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	43 PNS, 29 PPPK, 175 TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	0

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal.
2. Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. (tidak ada atau tidak diinformasikan ke DP2CKTR Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) di setiap proyek Relokasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pengalokasian anggarannya).

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD;
2. Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
----	-----------------	---------------	----------------	---------------------

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2024
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2024

4.5.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Satuan Polisi Pamong Praja	1996825	1996825	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan <u>perkada</u> Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena penegakan hukum Perda dan <u>perkada</u>
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	124121	124121	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
		layananan formasi rawan bencana					<u>bencana</u> Jumlah Warga Kabupaten rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	124121	124121	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap <u>bencana</u> . Jumlah Warga Kabupaten rawan bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4279	4279	100%	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	230	230	100%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dampak kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota yang seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat lengkap (Orang)

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara lain:

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	21,959,287,117	21,220,037,005	96.63 %

1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		12,199,401,198	11,895,881,047	97.51 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2024444	10,691,333,139	10,561,509,955	98.79 %
		1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	1,380,778,800	1,364,189,328	98.80 %
		2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	7,438,658,450	7,357,000,450	98.90 %
		3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	585,631,089	585,000,250	99.89 %
		4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	125,620,560	96,750,927	77.02 %
		5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	417,394,240	416,319,000	99.74 %
		6 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	743,250,000	742,250,000	99.87 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2024455	1,388,768,859	1,215,200,000	87.50 %
		1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500,000,000	416,500,000	83.30 %
		2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,000,000	100,000,000	100.00 %
		3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	788,768,859	698,700,000	88.58 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2024457	119,299,200	119,171,092	99.89 %
		1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	119,299,200	119,171,092	99.89 %
	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1,989,217,012	1,761,466,949	88.55 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2024456	643,246,470	597,448,195	92.88 %
		1 Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	75,000,000	73,445,925	97.93 %
		2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	568,246,470	524,002,270	92.21 %

5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2024447		342,998,867	330,010,904	96.21 %
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	80,000,000	77,783,250	97.23 %
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	81,348,867	77,105,000	94.78 %
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	165,000,000	158,568,154	96.10 %
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16,650,000	16,554,500	99.43 %
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2024445		270,000,000	270,000,000	100.00 %
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	270,000,000	270,000,000	100.00 %
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2024446		732,971,675	564,007,850	76.95 %
	1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	732,971,675	564,007,850	76.95 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		7,770,668,907	7,562,689,009	97.32 %
8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2024449		7,516,679,256	7,370,134,609	98.05 %
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	520,000,000	515,727,515	99.18 %
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	57,500,000	54,983,630	95.62 %
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	446,917,546	380,499,488	85.14 %
	4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	6,492,261,710	6,418,923,976	98.87 %
9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2024459		253,989,651	192,554,400	75.81 %
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	177,102,832	125,829,900	71.05 %
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	76,886,819	66,724,500	86.78 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	PAGU
----	-----------	------

1	ABPD Kabupaten Sidoarjo	5,258,517,240,058
2	Alokasi Anggaran Satker PD	76,539,669,516
3	Alokasi Anggaran SPM	21,098,596,352
	APBD	21,098,596,352
	APBD Murni	19,488,011,352
	APBD BAGI HASIL	1,610,585,000

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Personil
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	84 PNS, 240 NON PNS
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	43 PNS, 29 PPPK, 175 TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

a. Penegakan perda dan perkara

Banyak peraturan perda perkara yang belum ditegakkan dengan baik sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan mulai penyuluhan, pembinaan maupun penegakan hukum. Kasus dominan terkait dengan penegakan perda adalah pelanggaran izin

b. KRB Belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap desa atau kelurahan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan barang

dan biaya untuk pengantasan bencana baik di pra bencana maupun pasca bencana.

- c. Pola Layanan dan kesiapsiagaan bencana selama ini belum maksimal karena selalu mengandalkan tatap muka yang diundang oleh BPBD Kabupaten.
- d. Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh. Selain itu belum terbentuknya relawan kebakaran dan Satuan Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di desa/kelurahan juga menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya target respon time. Penanganan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo sementara masih mengandalkan aparatur dan sarana prasarana dr BPBD, sementara itu dengan jumlah kejadian kebakaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 menyebabkan rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran menurun.

Adapun solusi yang kami upayakan antara lain :

- a. Dokumen Teknis dari KRB agar disahkan dalam PERBUP atau SK Bupati, agar mudah di Reviu tiap tahun (KRB Per Desa/Kelurahan)
- b. Reviu Bencana tiap tahun hendaknya melibatkan dari pihak Desa dan Kecamatan dengan Hasil Reviu berbasis peta citra.
- c. Dokumen Teknis KRB (KRB perdesa kelurahan) harus detail menyajikan area yang rawan bencana per Desa/Kelurahan sehingga bisa dihitung perencanaan kebutuhan barang dan biaya penanganan Bencana (Pra dan Pasca) lebih detail.
- d. Posting/alokasi anggaran dan barang diserahkan kepada OPD masing2 yang menangani dibawah koordinasi BPBD seperti Dinsos, Dinkes, DP2CKTR.
- e. Membuat Group WA berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, WA group Desa dan WA Group RT.
- f. BPBD Menyiapkan materi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti mitigasi bencana dan bagaimana penangann bencana (Pra dan Pasca) Berupa video animasi dan paparan.
- g. Mengadakan pelatihan perwakilan dari satgas bencana tiap desa/kelurahan yang dibagi perkecamatan.

4.6 Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Jumlah Warga Kabupaten yang	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	khususnyagelanda ngandanpengemis diluar Panti	gelandangan danpengemis yang mperolehrehabilitasis ocialdasartuna sosial diluar panti		
5	Perlindungan danjaminan sosial padasaattanggap& paskabencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skalakabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat& pasca	100%	2024

4.6.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	Dinas Sosia	3865	3865	100%	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti Jumlah keseluruhan warga kabupaten penyandang disabilitas diluar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosia	1185	1185	100%	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah keseluruhan anak telantardiluar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten lanjut usiatelantar yangmemperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial	84492	84492	100%	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti JumlahWarga Kabupaten lanjut usiatelantar diluar panti

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis ang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti	Dinas Sosial	80	80	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis diluar panti
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Presentase (%) korban bencana skalakabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat& pasca	Dinas Sosial	33630	33630	100 %	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial Antara lain:

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	8,312,813,555	7,975,654,143	95.94 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8,312,813,555	7,975,654,143	95.94 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2024152	8,256,813,555	7,922,481,643	95.95 %
	1 Penyediaan permakanaan	7,048,825,600	6,755,854,600	95.84 %
	2 Penyediaan sandang	14,459,322	14,444,400	99.90 %
	3 Penyediaan alat bantu	100,815,000	100,738,750	99.92 %
	4 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	191,075,000	186,861,250	97.79 %
	5 Pemberian layanan data dan pengaduan	121,595,538	84,754,994	69.70 %
	6 Pemberian layanan kedaruratan	780,043,095	779,827,649	99.97 %
	JUMLAH INDIKATOR	8,256,813,555	7,922,481,643	95.95 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2024153	56,000,000	53,172,500	94.95 %
	1 Penyediaan makanan	48,000,000	47,722,500	99.42 %

		2	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	8,000,000	5,450,000	68.13 %
--	--	---	--	-----------	-----------	---------

4.6.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	PAGU
1	ABPD Kabupaten Sidoarjo	5,258,517,240,058
2	Alokasi Anggaran Satker PD	47,594,650,844
3	Alokasi Anggaran SPM	216,104,202,576
	APBD	10,463,495,576
	APBD Murni	10,463,495,576
	NON APBD	205,640,707,000
	APBN	205,640,707,000
	APBN-TUGAS PEMBANTUAN	205,640,707,000

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	27PNS 31 NON PNS 140 SLRT 18 TKSK 50 TAGANA 125 PKH
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar Panti	
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :

1. Pengumpulan Data

- a. Data Kependudukan yang belum tervalidasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Belum berekapan untuk lansia, dll)
- b. Masih ditemukan lansia/disabilitas yang belum berkenan untuk dilakukan pendataan

2. Penghitungan Kebutuhan

Data DTKS cakupan daerah jika dibandingkan dengan DTKS Pusat itu yang di jadikan sasaran Penerapan SPM

3. Perencanaan dan Penganggaran

Masih banyak anggaran yang di biayai oleh pusat, belum di akomodir oleh anggaran pemerintah daerah

4. Pelaksanaan

Masih terdapat daftar tunggu bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan

Target yang dilayani pada SPM bencana disesuaikan dengan bantuan yang tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2024 sehingga menjadi capaian 100% karena sifatnya yang insidental, dan sampai dengan selesainya tahun anggaran 2024 tercatat masih terdapat persediaan sembako untuk bencana yang akan disalurkan apabila terjadi bencana dan terdapat laporan atau permintaan yang diterima.

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program SKPD

Program SKPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program SKPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas SKPD

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapanprogram. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas SKPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan SKPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Contohnya seperti program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Dimana program lintas SKPD ini membutuhkan koordinasi dari beberapa Dinas terkait seperti Disporabudpar dan Dinsosnaker Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program SKPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang Urusan yang dilakukan antara lain :

4.7.1 Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
KAB. SIDOARJO		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629	
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	10	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	11	Pembangunan Ruang Kelas Baru
\	12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	13	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647	
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	2	Pengadaan Mebel Sekolah
	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	10	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	11	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412	
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	4	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

	6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444	
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

4.7.2. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
KAB. SIDOARJO		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2024237	
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.7.3. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
---------	----------	--------------

KAB. SIDOARJO		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2024638	
	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559	
	1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
	4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4.7.4. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2024348
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	
	1	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

4.7.5. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2024444

	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
	6	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2024455	
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2024457	
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	
4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2024456	
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2024447	
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2024445	
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2024446	
	1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	

	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2024449
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
	9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2024459
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

4.7.6. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2024152
	1	Penyediaan permakanan
	2	Penyediaan sandang
	3	Penyediaan alat bantu
	4	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
	5	Pemberian layanan data dan pengaduan
	6	Pemberian layanan kedaruratan
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2024153
	1	Penyediaan makanan
	2	Penanganan khusus bagi kelompok rentan

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 kami sampaikan. Kegiatan Penyusunan Capaian LPPD Tahun 2024 dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait didalam LPPD telah dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	JUDUL GRAFIK	HAL
I.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024	4
I.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo	7
I.3	Komposisi Penduduk Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	8
I.4	Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo	17
I.5	Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo	19
II.1	Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024	62
II.2	IPM Tahun 2024	63
II.3	Perkembangan Tingkat Miskin di Kabupaten Sidoarjo	64
II.4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2024	97
II.5	Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo 2018 – 2024	100
II.6	perkembangan nilai indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 – 2024	106
II.7	Rata-Rata Nilai Indeks SPBE Nasional	106
II.8	Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo	109
II.9	Perkembangan Jumlah Inovasi Melalui Partisipasi Perangkat Daerah	109
II.10	Perkembangan Penyelenggaraan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2022 – 2024	111
II.11	Perkembangan Nilai IPP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024	113

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	HAL
I.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024	3
I.2	Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2024	5
I.3	Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2024	6
I.4	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2024	6
I.5	Komposisi Penduduk Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024	7
I.6	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	8
I.7	Desa dan Kelurahan per Kecamatan	9
I.8	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 2020-2024	10
I.9	Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	11
I.10	Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	14
I.11	Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 - 2024	17
I.12	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	17
I.13	Rincian Realisasi dan Target PAD Tahun Anggaran 2024	18
I.14	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2021 - 2024	19

I.15	Target dan Realisasi Belanja Daerah 2024	20
I.16	Realisasi Anggaran Tahun 2024	20
I.17	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo	37
I.18	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	38
I.19	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	41
I.20	Keselarasn Target Indikator Pembangunan Daerah antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	48
I.21	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	53
I.22	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Pendidikan	54
I.23	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	54
I.24	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Kesehatan	55
I.25	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	56
I.26	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Pekerjaan Umum	56
I.27	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	57
I.28	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	57
I.29	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	58
I.30	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	58
I.31	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	59
I.32	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Sosial	60
II.1	Capaian Kinerja Makro	61
II.2	Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo	63
II.3	Capaian TPT Kabupaten Sidoarjo terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	65

II.4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo	66
II.5	Perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo	67
II.6	IKK Outcome Urusan Pendidikan	68
II.7	IKK Outcome Urusan Kesehatan	68
II.8	IKK Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
II.9	IKK Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70
II.10	Ikk Outcome Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum Dan Perlindungan Masyarakat	72
II.11	IKK Outcome Urusan Sosial	72
II.12	IKK Outcome Urusan Tenaga Kerja	73
II.13	Ikk Outcome Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	73
II.14	IKK Outcome Urusan Pangan	74
II.15	IKK Outcome Urusan Pertanahan	74
II.16	IKK Outcome Urusan Lingkungan Hidup	75
II.17	Ikk Outcome Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	75
II.18	Ikk Outcome Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	76
II.19	Ikk Outcome Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	77
II.20	IKK Outcome Urusan Perhubungan	77
II.21	Ikk Outcome Urusan Komunikasi Dan Informatika	78
II.22	Ikk Outcome Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	78
II.23	Ikk Outcome Urusan Penanaman Modal	79
II.24	Ikk Outcome Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	79
II.25	Ikk Outcome Urusan Statistik	80

II.26	Ikk Outcome Urusan Persandian	80
II.27	Ikk Outcome Urusan Kebudayaan	80
II.28	Ikk Outcome Urusan Perpustakaan	81
II.29	Ikk Outcome Urusan Kearsipan	81
II.30	Ikk Outcome Urusan Kelautan Dan Perikanan	82
II.31	Ikk Outcome Urusan Pariwisata	82
II.32	Ikk Outcome Urusan Pertanian	83
II.33	Ikk Outcome Urusan Kehutanan	83
II.34	Ikk Outcome Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral	84
II.35	IKK Outcome Urusan Perdagangan	84
II.36	IKK Outcome Urusan Perindustrian	84
II.37	IKK Outcome Urusan Transmigrasi	86
II.38	Ikk Outcome Urusan Perencanaan dan Keuangan	86
II.39	Ikk Outcome Urusan Pengadaan	86
II.40	Ikk Outcome Urusan Kepegawaian	87
II.41	Ikk Outcome Urusan Manajemen Keuangan	88
II.42	Ikk Outcome Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik	88
II.43	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	90
II.44	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024	90
II.45	Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	93
II.46	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 202	94
II.47	Sasaran 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital	99
II.48	Indikator Kinerja ke-1 : Nilai SAKIP Kabupaten	99
II.49	Indikator Kinerja II : Opini Atas Laporan BPK	101

II.50	Tren Capaian Opini Atas Audit BPK 5 Tahun Terakhir	102
II.51	Indikator Kinerja III : Survey Eksternal Persepsi Korupsi	103
II.52	Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo	104
II.53	Indikator Kinerja IV : Status Kinerja LPPD	105
II.54	Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Tahun 2023	105
II.55	Indikator Kinerja V : Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	106
II.56	Indikator Kinerja VI : Indeks Inovasi Daerah	108
II.57	Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo	109
II.58	Indikator Kinerja VII : Tingkat Maturitas SPIP	110
II.59	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	112
II.60	Realisasi Anggaran Tahun 2024	114
IV.1	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	129
IV.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Urusan Pendidikan	129
IV.3	Realisasi Urusan Pendidikan	131
IV.4	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan	132
IV.5	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	134
IV.6	Dukungan Personil Urusan Pendidikan	134
IV.7	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	136
IV.8	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Urusan Kesehatan	136
IV.9	Realisasi Urusan Kesehatan	138
IV.10	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan	140
IV.11	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan	141
IV.12	Dukungan Personil Urusan Kesehatan	142
IV.13	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	143

IV.14	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Urusan Pekerjaan Umum	144
IV.15	Realisasi Urusan Pekerjaan Umum	145
IV.16	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum	146
IV.17	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	147
IV.18	Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum	147
IV.19	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	148
IV.20	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	148
IV.21	Realisasi Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	149
IV.22	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	149
IV.23	Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	150
IV.24	Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	150
IV.25	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	151
IV.26	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	152
IV.27	Realisasi Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	152
IV.28	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	153
IV.29	Alokasi Anggaran Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	156
IV.30	Dukungan Personil Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	156
IV.31	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	158
IV.32	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Urusan Sosial	158
IV.33	Realisasi Urusan Sosial	159

IV.34	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial	160
IV.35	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	161
IV.36	Dukungan Personil Urusan Sosial	161
IV.37	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan	163
IV.38	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan	165
IV.39	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	166
IV.40	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	166
IV.41	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	166
IV.42	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial	168

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HAL
I.1	Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	3